

No. 107 November - Desember 2014

BaKTI News

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**Nurman
Sang Penebar
Benih Harapan**

**Program Penanggulangan
Kemiskinan Bukan Sekedar
Business As Usual**

**Mendekatkan
Parlemen
dengan Rakyat**

**Perencanaan Kesehatan
Berbasis Data di Kabupaten
Minahasa Utara**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X





BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **CAROLINE TUPAMAHU**
VICTORIA NGANTUNG
MELYA FINDI ASTUTI
Suara Forum KTI **ZUSANNA GOSAL**
ITA MASITA IBNU
Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**
Website **ADITYA RAKHMAT**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**
Database
Kontak **A. RINI INDAYANI**
Design & layout
Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id atau mengirimkan SMS kepada kami.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id or send us SMS.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTI**NEWS** DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH KANADA / BaKTI**NEWS** IS PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT OF THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA.

PANDANGAN YANG DIKEMUKAKAN TAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN PANDANGAN YAYASAN BaKTI MAUPUN PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH KANADA. / THE VIEWS EXPRESSED DO NOT NECESSARILY REFLECT THE VIEWS OF YAYASAN BaKTI, THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA.



Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



Affaires étrangères, Commerce
et Développement Canada

Foreign Affairs, Trade and
Development Canada

Daftar Isi

BaKTI**News**

November- Desember 2014

No. 107

- 1** Program Mitra - AgFor
Nurman
Sang Penebar Benih Harapan
Oleh **Enggar Paramita**
- 6** Program Mampu-BaKTI
Mendekatkan Parlemen
dengan Rakyat
Oleh **M. Ghufan H. Kordi K**
- 9** Papua
Cerita Kelaparan Massal di Papua
(Bagian II)
A story of mass starvation in Papua
(Part II)
Oleh **Bobby Anderson**
- 14** Program Mitra - BASICS
Perencanaan Kesehatan Berbasis Data
Di Kabupaten Minahasa Utara
- 17** KM BaKTI-AIPD
Peluncuran Paket Buku Panduan
Pendukung Pelaksanaan Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gender
di Daerah
Oleh **Junaedi Uko**
- 21** **Mengapa Korban Napza**
Harus Didukung Bukan Dihukum
Oleh **Farid Satria**
- 24** Policy Brief - JiKTI
Program Penganggulangan
Kemiskinan Bukan Sekedar
Bussiness As Usual
Oleh **Dr. Ahmad Zaini & Moh. Taquiuddin, S.Pt, M.Si**
- 28** Program Update
UNICEF - BaKTI
- 30** Program Mitra - Wahana Visi Indonesia
Air Bersih Membawa
Harapan ke Mangu
Clean Water Brings Hope to Mangu
Oleh **Rena Tanjung**
- 32** **Sharing Pengalaman :**
Forum Belajar
Lembaga Layanan Kawasan Timur
Oleh **Sarni Mawarni**
- 34** Program KINERJA - USAID Papua
Strategi Memperkuat
Sistem Kesehatan Papua
Oleh **Luna Vidya**
- 38** Praktik Cerdas
Upayakan Pelayanan
Berkualitas
- 40** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku

Sekitar 2,2 juta petani skala kecil di Sulawesi membudidayakan kakao di lahan seluas 1,5 juta hektar, berkontribusi hingga 67% dari produksi kakao Indonesia.

Para petani kecil ini, berperan besar membawa negeri ini menjadi produsen kakao ketiga terbesar di dunia.

Foto : AgFOR/Yusuf Achmad



Program Mitra - AgFor

Nurman

Sang Penebar Benih Harapan

Oleh **Enggar Paramita**

Foto **Yusuf Achmad**

Kakao (*Theobroma cacao*), atau yang sering disebut sebagai makanan para dewa adalah salah satu komoditas penunjang hidup utama bagi petani di Sulawesi. Sekitar 2,2 juta petani skala kecil di Sulawesi membudidayakan kakao di lahan seluas 1,5 juta hektar, berkontribusi hingga 67% dari produksi kakao Indonesia yang notabene merupakan negara ketiga penghasil kakao terbesar di dunia.

Beberapa tahun belakangan, serangan hama penyakit, disertai dengan usia pohon yang telah lanjut mengakibatkan menurunnya hasil panen. Hal ini tidak hanya merugikan, namun sanggup membuat petani frustrasi, hingga memutuskan untuk beralih pada tanaman lain yang dianggap lebih menguntungkan seperti cengkeh dan merica.

Namun tidak begitu dengan Nurman, seorang petani kakao asal Gantarangkeke, Bantaeng, yang justru semakin giat bekerja di kebun kakaonya. Sempat berprofesi sebagai sopir pete-pete jurusan Bantaeng-Banyorang, Nurman terlebih dulu mencoba peruntungan dengan bertani jagung, sebelum akhirnya berfokus pada kakao.



Setiap hari, Nurman mencurahkan sebagian besar waktunya untuk bekerja di kebun. Ia memantau kondisi tanaman dan melakukan tindakan pencegahan terhadap gejala awal serangan hama dan penyakit.



Di Bantaeng, harga biji kakao yang telah dikeringkan dan difermentasi dengan kadar air 8-8.5% mencapai Rp 32.000,-/kg (data bulan Juni 2014).

Tahun 2010, ia berkesempatan memperdalam budi daya kakao di Pusat Pengembangan Kakao Mars di Palopo. Berbekal pengetahuan dan entris bibit unggul yang diperoleh, ia melakukan sambung samping pada tanaman kakaonya.

Setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 4 sore, Nurman bekerja di kebun. Ia memeriksa kondisi tanaman, menyiangi rumput, memangkas, mengamati perubahan, mencatatnya, dan memastikan tanaman berada dalam kondisi prima. Ia menerapkan 'Praktik Pertanian yang Baik' dan metode 'Pemangkasan, Sanitasi, Panen sering, Pemupukan (PSPsP)' sehingga hasil kebun pun maksimal.

Dari lahan seluas 0,5 hektar yang ditanami 320 pohon kakao, Nurman mampu menghasilkan sekitar 1 ton kakao. Bahkan, ia pernah mendapati 1 tanamannya memproduksi hingga 175 buah dalam kurun waktu 1 tahun. Di kebun tersebut, Nurman juga menanam gamal, petai, cengkeh, lempuyang, serai, pisang





Agforestry Specialist AgFor, Andi Prahmono (kiri) dan Nurman belajar bersama tentang okulasi.



sehingga ia memperoleh penghasilan tambahan dari tanaman-tanaman ini. Ia pun mengembangkan usaha pembibitan yang selalu ramai mendapat pesanan.

Tahun 2012, Nurman resmi menjadi kelompok binaan AgFor Sulawesi. Ia yang haus ilmu pengetahuan merasa beruntung dapat bergabung dengan AgFor, karena mendapat kesempatan belajar. Melalui AgFor, Nurman mengaku banyak mendapat pengetahuan baru, misalnya tentang cara penanggulangan hama dan penyakit secara alami, teknik susuan, okulasi pada kakao, penyemaian yang baik, dan budi daya tanaman buah-buahan.

Kini kebun Nurman kerap menjadi tujuan utama studi banding berbagai lembaga dan petani, termasuk petani

Karena perawatan yang optimal, tanaman kakao Nurman dapat terus-menerus berproduksi sepanjang tahun, tidak terbatas hanya di musim panen.



Kebun Nurman juga ditanami dengan jenis tanaman lainnya seperti gamal, petai, cengek, lempuyang, serai, dan pisang. Terlihat tanaman cengek Nurman mulai berbunga.

binaan AgFor dari desa dan kabupaten lain. Ia menjadi penyuluh swadaya, dan tidak pernah segan berbagi ilmu kepada siapa saja. “Bagi saya, memberi pengetahuan kepada sesama adalah ibadah. Saya ikhlas, dan tidak mengharap imbalan apa-apa,” kata Nurman.

Selain membudidayakan klon unggulan MO1 dan MO4, Nurman juga mengembangkan beberapa klon unggulan lokal yang diberi nama N21, N22, dan GTB. 'N' diambil dari inisial namanya 'Nurman', sedangkan 'GTB' adalah singkatan dari 'Gantarangeke Bantaeng'



Tanaman kakao Nurman berbuah subur berkat penerapan teknik 'Praktik Pertanian yang Baik' dan metode PSPsP

“Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi semangat bagi petani lain, bahwa kakao ini jika kita rawat, maka hasilnya pasti bagus. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi, agar teman-teman petani dapat bangkit kembali untuk menanam kakao,” katanya. Nurman tak akan berhenti menebar benih harapan, karena ia percaya, masih ada masa depan untuk kakao.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Communication Officer untuk Proyek AgFor Sulawesi - World Agroforestry Center dan dapat dihubungi melalui email e.paramita@cgiar.org



PELIBATAN KONSTITUEN. Anggota parlemen pun tidak sekadar mengklaim mewakili rakyat, tetapi rakyat yang diwakilinya juga berani menyatakan bahwa, mereka mempunyai wakil di parlemen.

Program MAMPU-BaKTI

Mendekatkan Parlemen dengan Rakyat

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K**

Parlemen (DPR/DPRD) adalah lembaga politik yang dibuat untuk menjembatani kebutuhan dan kepentingan rakyat dengan kalangan eksekutif. Karena itu, anggota parlemen disebut sebagai wakil rakyat. Mereka duduk di parlemen dengan memperoleh sejumlah fasilitas negara, yang tidak dinikmati oleh rakyat yang mereka wakili.

Agar anggota parlemen mempunyai hubungan langsung dengan rakyat yang diwakilinya, maka penerapan sistem pemilihan langsung dianggap ideal dalam menghasilkan anggota parlemen yang berkualitas. Pemilihan langsung dianggap ideal karena rakyat dapat mengetahui wakilnya di

parlemen, sementara anggota parlemen selalu membangun hubungan dengan rakyat yang diwakilinya.

Namun, sejak pemilihan anggota parlemen dilakukan secara demokratis pada pemilihan umum (Pemilu) 1999 sampai sekarang, kinerja anggota parlemen tidak membanggakan. Apalagi sejumlah permasalahan yang dilakukan oleh anggota parlemen ikut mencoreng parlemen di Indonesia, dari pusat (DPR RI) hingga daerah (DPRD).

Berbagai studi mengkonfirmasi mengenai kinerja parlemen yang tidak membanggakan itu.

Rakyat pun merasa tidak diwakili oleh anggota parlemen yang dipilihnya. Sebanyak 65,5 persen masyarakat tidak merasakan peran DPR dalam menghasilkan produk UU atau pembelaan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat (INES, 2013), sementara sebanyak 93 persen masyarakat tidak merasa terwakili oleh anggota DPR (Formappi, 2011).

TatibTAP

Tentu situasinya lebih sulit lagi pada parlemen di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Tidak hanya kualitas anggota parlemen di daerah yang jauh dari kondisi ideal, tetapi sistem kerja parlemen juga menutup ruang partisipasi dan kontrol rakyat sebagai konstituen. Sistem kerja parlemen yang diatur dalam Tata Tertib (Tatib) sering dituding sebagai “tameng” untuk melindungi anggota parlemen dari kontrol publik, dan sebagai “pagar” untuk mencegah partisipasi publik dalam mengawasi kinerja anggota parlemen.

Tatib seakan-akan kitab suci yang hanya bisa ditafsir oleh anggota parlemen. Pembuatan Tatib di parlemen pun tidak melibatkan rakyat, sehingga isi Tatib tidak lebih dari aturan-aturan untuk keamanan subyektif anggota parlemen. Bukan berarti semua anggota parlemen setuju dengan Tatib yang tidak bersahabat dengan rakyat itu.

Karena itu, munculnya Tatib yang lebih mendekatkan parlemen dengan rakyat adalah inovasi dan pembelajaran bagi perbaikan parlemen. Munculnya Tatib yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif (TAP) tidak hanya mendekatkan rakyat dengan parlemen, tetapi juga memperbaiki kinerja anggota parlemen.

DPRD Parepare sebagai Pionir

Di Sulawesi Selatan, DPRD Kota Parepare merupakan pionir lahirnya Tatib yang TAP. Yayasan Lembaga Pengkajian, Pengembangan Ekonomi, dan Masyarakat (YLP2EM) adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang ikut berkontribusi lahirnya Tatib DPRD Parepare yang TAP.

DPRD Parepare periode 2009-2014 mengembangkan Tatib, yang tidak hanya mengatur sesama wakil rakyat di dalam parlemen, tetapi juga mengatur hubungan dengan rakyat. Kantor DPRD Parepare pun benar-benar menjadi rumah bagi rakyat, sehingga begitu mudah rakyat berinteraksi dengan wakil mereka di DPRD.

Istilah “Fraksi Balkon” yang sekarang populer, adalah istilah yang muncul di DPRD Parepare sejak periode 2009-2014. Istilah ini menunjuk pada kehadiran kelompok-kelompok kepentingan dalam rapat-rapat di DPRD Parepare dan menempati balkon. Fraksi Balkon terdiri dari berbagai kelompok



Foto: Junardi Jurji/Dok. BaKTI-MAAMPU

RUANG ASPIRASI BAGI RAKYAT. Tatib juga akan mengatur penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa. Unjuk rasa atau demonstrasi di DPRD Parepare bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diberi tempat khusus.

masyarakat yang diundang untuk mengikuti rapat-rapat di DPRD.

Fraksi ini hanya menjadi penonton selama proses persidangan di DPRD Parepare, namun mereka kemudian bisa melihat dan menilai wakil mereka di parlemen selama persidangan. Anggota parlemen yang berbicara dan apa yang dibicarakan akan dinilai oleh rakyat yang berada di balkon. Demikian juga, wakil rakyat yang tidak pernah berbicara selama persidangan di DPRD, atau asal berbicara, akan dinilai oleh rakyat yang menghadiri persidangan tersebut.

Sekalipun hanya menjadi penonton dalam persidangan, keberadaan Fraksi Balkon adalah kemajuan yang patut diapresiasi. Pasalnya, selama ini persidangan parlemen di Indonesia, terutama di daerah, menjadi persidangan tertutup, sekalipun sidang atau rapat tersebut merupakan rapat yang terbuka untuk umum.

Di periode 2014-2019, DPRD Parepare berjanji meningkatkan Tatib tersebut menjadi lebih baik. Selain Fraksi Balkon yang akan diatur dalam Tatib, Tatib juga akan mengatur rapat-rapat DPRD yang disiarkan langsung oleh Radio dan Televisi setempat. Tiga hari sebelum rapat, Sekretariat DPRD Parepare akan mengumumkan agenda rapat melalui papan informasi yang ditempatkan di tempat-



tempat umum maupun melalui media massa setempat, baik cetak maupun elektronik.

Tatib juga akan mengatur penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa. Unjuk rasa atau demonstrasi di DPRD Parepare bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diberi tempat khusus. Setiap kelompok konstituen atau rakyat yang melakukan unjuk rasa di DPRD Parepare, sebelum diterima oleh anggota parlemen, mereka dapat berorasi pada panggung yang telah disediakan. Pembuatan panggung unjuk rasa, selain memudahkan rakyat ketika menyampaikan aspirasi di parlemen, juga menjadi suatu penghormatan terhadap rakyat yang datang ke parlemen.

Maros dan Tana Toraja

Pembuatan Tatib TAP membuka ruang bagi partisipasi konstituen, selain memperbaiki citra parlemen yang buruk, juga membuka hubungan yang lebih baik antara wakil rakyat dan konstituen. Anggota parlemen pun tidak sekadar mengklaim mewakili rakyat, tetapi rakyat yang diwakilinya juga berani menyatakan bahwa, mereka mempunyai wakil di parlemen.

Inovasi di DPRD Parepare kini menjalar ke DPRD Maros dan DPRD Tana Toraja. Di Maros, lembaga MAUPE memberi masukan bagi Tatib DPRD. Agar Tatib yang dibuat oleh Pansus Tatib DPRD Maros lebih kaya, maka pada 7 Oktober 2014 bertempat di Kantor BaKTI Makassar, anggota DPRD Maros berdiskusi dengan anggota DPRD Parepare tentang Tatib TAP dan pengalaman DPRD Parepare dalam mengembangkan dan menerapkan Tatib tersebut.

Para wakil rakyat di DPRD Parepare, Maros, dan Tana Toraja pun mendukung upaya-upaya mitra untuk ikut meningkatkan kinerja parlemen, termasuk menguatkan kapasitas APP. Para wakil rakyat di tiga daerah tersebut mendukung Program MAMPU dalam hal penguatan kapasitas APP.

Sedangkan pada 13 Oktober 2014, anggota DPRD Tana Toraja berdiskusi dengan anggota DPRD Parepare mengenai Tatib DPRD yang TAP. Bersama Yayasan Kombongan Situru (YKS), DPRD Tana Toraja akan mengadopsi pengalaman DPRD Parepare. Pengalaman DPRD Parepare yang mengembangkan Tatib TAP sejak 2009 menjadikan DPRD Parepare sebagai tempat pembelajaran bagi perbaikan kinerja parlemen.

Membuka Ruang untuk APP

Catatan lain yang harus diapresiasi pada Tatib TAP adalah memberi peluang kepada Anggota Parlemen Perempuan (APP) untuk berperan di parlemen. Tatib TAP mengatur keterlibatan perempuan di setiap alat kelengkapan dewan. Ini tidak hanya membuka peluang APP untuk eksis di parlemen, tetapi juga memacu APP untuk meningkatkan kapasitasnya.

Para wakil rakyat di DPRD Parepare, Maros, dan Tana Toraja pun mendukung upaya-upaya mitra untuk ikut meningkatkan kinerja parlemen, termasuk menguatkan kapasitas APP. Para wakil rakyat di tiga daerah tersebut mendukung Program MAMPU dalam hal penguatan kapasitas APP.

Penguatan kapasitas APP menjadi hal yang penting karena jumlah mereka yang sangat sedikit. Dengan jumlah yang sedikit tersebut, APP ini dapat mengambil peran dan eksis di parlemen yang didominasi oleh laki-laki, jika para APP tersebut memiliki kapasitas yang baik.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah konsultan Database dan Publikasi Media Program MAMPU-BaKTI. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Program Mampu-BaKTI, anda dapat menghubungi Lusia Palulungan (Program Manager Mampu-BaKTI) melalui email lpalulungan@bakti.or.id

Oleh **Bobby Anderson**

Pada April 2013 dilaporkan 95 masyarakat asli Papua meninggal dunia akibat kelaparan di Kecamatan Kwoor, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Sebanyak 533 orang lainnya dalam kondisi gawat dan dirawat di Rumah Sakit. Banyak orang telah meninggal sejak Desember 2012 dan banyak korban terkonsentrasi di desa-desa terpencil Tambrau seperti Baddei (atau Bakdei), Jokbi Joker (atau Jokjoker), dan Kasyefo.

Perjalanan ke Tambrau

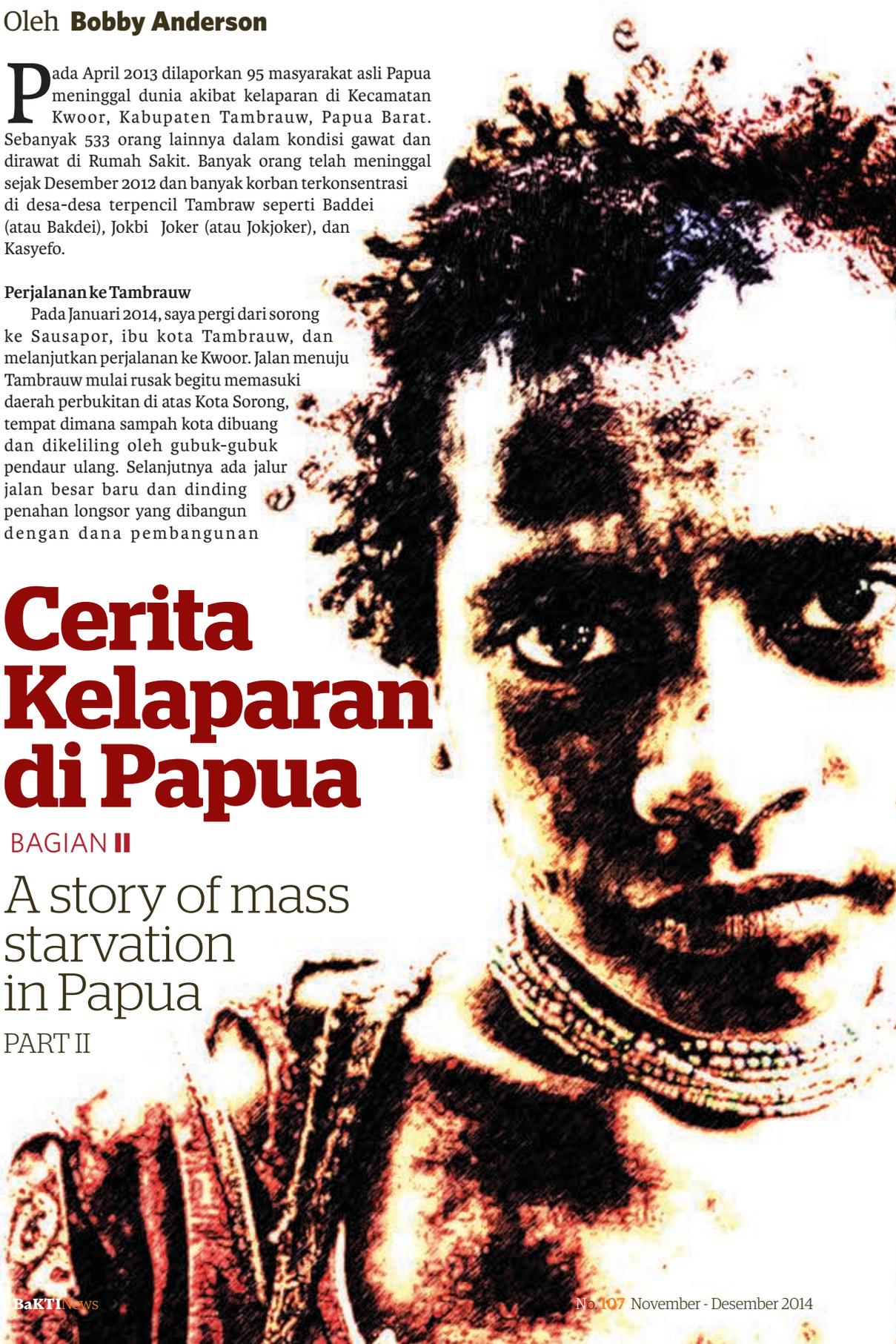
Pada Januari 2014, saya pergi dari sorong ke Sausapor, ibu kota Tambrau, dan melanjutkan perjalanan ke Kwoor. Jalan menuju Tambrau mulai rusak begitu memasuki daerah perbukitan di atas Kota Sorong, tempat dimana sampah kota dibuang dan dikelilingi oleh gubuk-gubuk pendaur ulang. Selanjutnya ada jalur jalan besar baru dan dinding penahan longsor yang dibangun dengan dana pembangunan

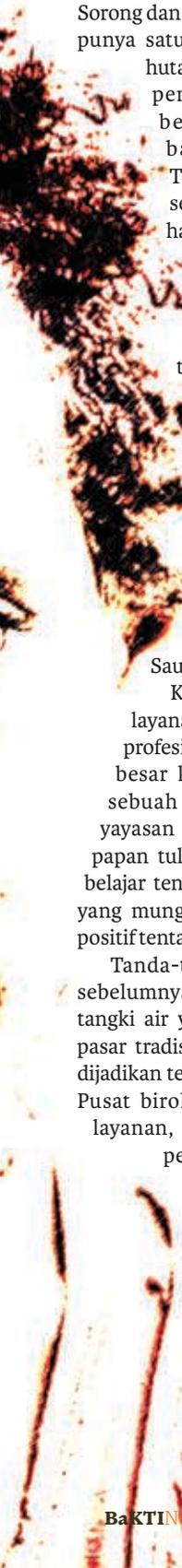
Cerita Kelaparan di Papua

BAGIAN II

A story of mass
starvation
in Papua

PART II





otonomi khusus. Jembatan-jembatan baru menggantikan jembatan lama yang dibuat dari bahan alam dan pepohonan. Semakin jelas terlihat menyedihkan begitu berkendara memasuki pinggiran Sorong dan memasuki Tambrauw, bahwa jalan-jalan ini punya satu tujuan: untuk membantu pengrusakan hutan-hutan yang masih perawan di sana. Camp penebangan liar dan gubuk-gubuk mulai bermunculan seiring dengan semakin banyaknya tempat pemotongan kayu. Tumpukan-tumpukan kayu jelas terlihat di sepanjang sisi jalan sementara kayu bulat hasil tebangan diapungkan di sungai

Meninggalkan perbukitan dan masuk ke daerah pesisir, kami menemukan jalan yang mengerikan, di satu sisinya masih ada hutan, namun di sisi lainnya dipenuhi tanaman merambat. Jauh di bawah, deburan ombak membuat kami berdebar dan terjaga sepanjang malam meski berada setengah mil dari pantai.

Sausapor dapat dicapai lima jam dari Sorong. Tempat ini mungkin yang paling suram di Papua, dibangun di sekitar landasan udara Amerika yang dibuat pada akhir Perang Dunia II, dengan beberapa jalan dan toko yang sudah tutup. Dua jam dari tepi kota Sausapor terletak Kwoor.

Kampung Kwoor, ibukota kecamatan di mana layanan publik semestinya tersedia dan paling profesional, terdapat sekolah dasar yang sebagian besar kaca jendelanya sudah pecah. Ada juga sebuah sekolah menengah, yang dikelola oleh yayasan swasta, masih berfungsi. Dari tulisan di papan tulis, tampaknya saat itu para siswa sedang belajar tentang peran Indonesia di ASEAN-pelajaran yang mungkin ditunjukkan untuk mengajarkan aspek positif tentang negara yang hilang dari hidup mereka.

Tanda-tanda proyek pembangunan yang gagal sebelumnya sangat banyak: sarana MCK tanpa air, tangki air yang rusak, generator yang tak berfungsi, pasar tradisional yang tak berdinding dan kemudian dijadikan tempat parkir sepeda motor; dan seterusnya. Pusat birokrasi Kwoor ditandai dengan buruknya layanan, PNS yang mangkir, dan gedung-gedung pemerintah yang kosong: ketidakamanan yang muncul dengan terlalu sedikitnya kehadiran negara.

In early April of 2013 it was reported that at least 95 indigenous Papuans had died of starvation in Kwoor sub-district, Tambrauw District, Papua Barat (West Papua). Another 553 were said to be seriously ill and at risk of imminent death. The deaths had begun in December of 2012 and most of the victims were concentrated in Tambrauw's remote villages of Baddei (alt: Bakdei), Jokbi Joker (alt: Jokjoker) and Kasyefo.

A road trip to Tambrauw

In January 2014, I drove with a colleague from Sorong to Sausapor, the capital of Tambrauw, and then continued to Kwoor. The road into Tambrauw starts to fall apart just into the hills above Kota Sorong, up where the city's garbage dump and surrounding recycler's shacks are. But then one begins to encounter vast tracts of new roads and retaining walls from a special autonomy-funded construction boom. New bridges replace older ones made of earth and entire trees. It becomes painfully obvious, the more one drives into remote Sorong and then Tambrauw, that these roads have one express purpose: to aid in the felling of these virgin forests. Independent logging camps and shacks nestle in distinctive clusters alongside small sawmills. Stacks of planks are visible on the roadsides while other trees are floated downriver.

Leaving the hills for the coast, we encounter an atrocious road, hemmed in on one side by jungle and on the other by kudzu. Far below, the relentlessly pounding surf keeps us awake at night even a half mile from the water. Sausapor is reached five hours after leaving Sorong. It may be one of the duller towns in Papua, built around an airstrip the Americans created at the end of WWII, with a few streets and shuttered shops. Two hours beyond Sausapor lies Kwoor.

Kampung Kwoor, the sub-district capital where services should be most available and most professional, hosts a local primary school with most of the windows smashed out. A secondary school, operated by a private foundation, still functions. From the writing on the chalkboard it seems the youth are learning about Indonesia's role in ASEAN - a lesson intended possibly to teach the children that there are positive aspects to the state which are missing from their lives.

Evidence of previous failed development projects was in abundance: waterless outhouses; broken water tanks; a failed generator; a bare 'traditional market' used as a motorcycle parking lot; and so on. Kwoor's bureaucratic centre is distinguished by derelict services, absentee civil servants, and empty government buildings: the insecurity that comes with too little state rather than too much.

Tanda-tanda proyek pembangunan yang gagal sebelumnya sangat banyak: sarana MCK tanpa air, tangki air yang rusak, generator yang tak berfungsi, pasar tradisional yang tak berdinding dan kemudian dijadikan tempat parkir sepeda motor; dan seterusnya.

Pusat birokrasi Kwoor ini dibedakan dengan layanan terlantar, absensi PNS, dan gedung-gedung pemerintah yang kosong: rasa tidak aman yang datang dengan terlalu sedikit negara bukan terlalu banyak.

Di sebelah timur Kwoor, terletak beberapa desa yang pernah menjadi bagian dari Kampung Kwoor. Desa-desa ini adalah desa hasil pemekaran. Tidak seperti banyak contoh negatif dari pemekaran wilayah, namun pemecahan Kampung Kwoor menjadi beberapa desa lagi tampaknya memang tepat karena jarak dari Kwoor ke desa-desa tersebut membutuhkan waktu satu hari berjalan kaki.

Kami mencoba pergi ke timur, dan mengira perjalanannya mudah, karena peta saya menunjukkan ada sebuah jembatan dari sungai di ujung timur kampung, selain itu ada jalur jalan di sepanjang garis pantai. Tapi apa yang ditunjukkan peta berbeda dengan kenyataan: jalannya berakhir di tepi sungai, tempat di mana dahulu pernah ada jembatan. Kami menyeberangi sungai satu demi satu dalam perahu kecil yang didayung oleh seorang anak perempuan berumur 12 tahun. Ia mendayung sangat cepat karena takut buaya. Setibanya kami di sisi lain sungai, kami berjalan kaki selama 45 menit di pantai sebelum mencengkeram tanaman rambat untuk memanjat bukit curam. Kami menemukan sisa-sisa tanaman merambat memenuhi jalan perintis yang hilang disapu banjir bandang dalam hitungan bulan. Setelah berjalan setengah jam di jalur barulah kami menyadari bahwa jalur yang kami lewat ini dulu adalah jalanan.

Setelah beberapa jam kami menyadari bahwa orang yang memandu kami tidak begitu memahami konsep ruang dan waktu. Dia selalu menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan jarak: 'satu jam setengah'. Semakin ke timur pesisir Tambrauw terletak pantai peneluran penyul belimbing terbesar di dunia. Sementara kearah darat, terdapat daerah penebangan kayu yang besar sekali, dimiliki oleh perusahaan kayu dari Jakarta bernama PT Multi Wahana Wijaya yang memegang hak konsesi selama 45 tahun.

Semakin beratnya kondisi topografi membuat perjalanan semakin sulit, namun tidak selamanya demikian. Bagi kami perjalanan ini lebih ke masalah waktu, bukan soal medan yang sulit. Bila mencoba hidup di sini, kondisi saya mungkin saja jadi tidak begitu baik karena kekurangan protein, namun saya masih bisa bertahan hidup dengan memakan buah, umbi-umbian, dan air. Ancaman terbesar bisa datang dari pemilik kebun yang buah dan umbinya saya

To the east of Kwoor lies a series of villages that were once part of Kampung Kwoor. They became villages through pemekaran (the proliferation of administrative units). Unlike so many negative examples of pemekaran, the dissolution of Kampung Kwoor into multiple units makes complete sense - these units are up to a day's walk from each other.

We attempted to go east, and we thought this would be easy, as my map indicated a bridge across the river immediately east of the kampung, and a road stretching along this coast. But the map was a fiction: the road ended where there was once a bridge but it was long gone. We crossed the river one-at-a-time in a skiff piloted by a 12 year old girl who paddled quickly because of her fear of crocodiles. Once on the other side, we walked for 45 minutes on a beach before using vines to scale a steep hill. We then reached the kudzu-entangled remains of a pioneer road which had been lost to arroyos (flash floods) in a matter of months. We walked on it for a half an hour before we realised it was once a road.

After another few hours we realised that the man leading us had no concept of space or time. He had only one answer for any query related to distance: 'an hour and a half'. Further to the east of coastal Tambrauw lie the greatest leatherback turtle nesting areas on earth. Further inland lies a huge logging area, held under a 45-year concession, by a Jakarta-based company, PT Multi Wahana Wijaya.

The increasing friction of such topography makes travel difficult, but not unduly so. For us it was a question of time, not terrain. Were I to try to live off this land, I would fare badly, due to a serious lack of protein, but I could survive on fruit, root crops and water. The biggest threat would be from the irate owners of the root crops I would dig up, followed by mosquitoes. But for the locals who know it, Tambrauw's jungle, rivers and ocean, all function as nature's supermarkets.

How to starve to death

It is no cliché to say that Papua is a rich and fertile land. The same also applies to Tambrauw. The district is sparsely populated and its bureaucratic sustainability as a separate district is tenuous at best. Despite the advent of logging, Tambrauw is still heavily forested, and these forests abound with wild pig, tree kangaroo and a large rat that is considered a delicacy. This is to say nothing of cassava, taro, sago and sweet potato in the higher elevations, along with bananas,

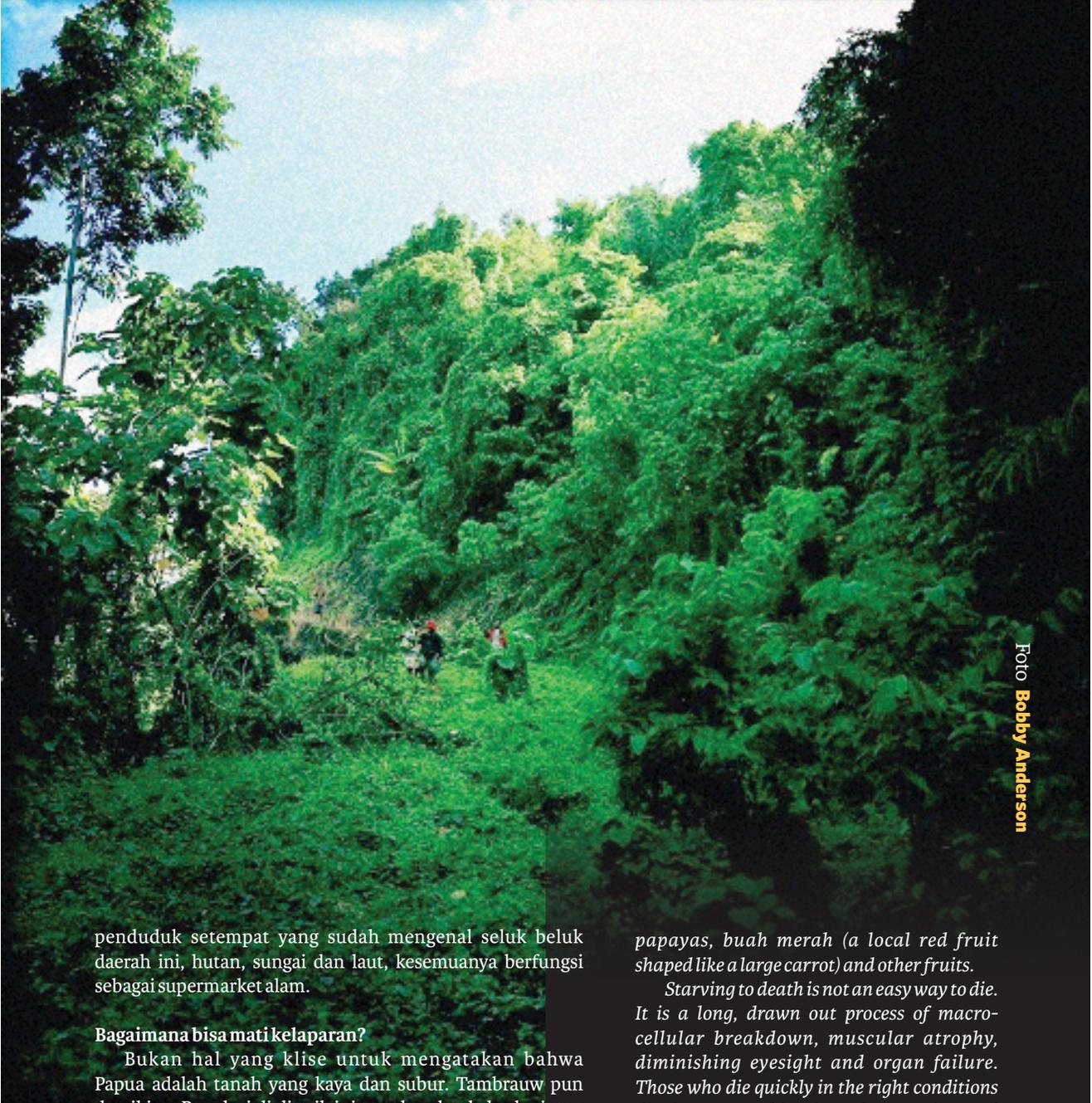


Foto Bobby Anderson

penduduk setempat yang sudah mengenal seluk beluk daerah ini, hutan, sungai dan laut, kesemuanya berfungsi sebagai supermarket alam.

Bagaimana bisa mati kelaparan?

Bukan hal yang klise untuk mengatakan bahwa Papua adalah tanah yang kaya dan subur. Tambrau pun demikian. Pada hari ini di wilayah ini terdapat beberapa hutan

papayas, buah merah (a local red fruit shaped like a large carrot) and other fruits.

Starving to death is not an easy way to die. It is a long, drawn out process of macro-cellular breakdown, muscular atrophy, diminishing eyesight and organ failure. Those who die quickly in the right conditions die from a combination of starvation and dehydration, with the latter being the primary cause of death. For starvation with an unlimited access to water-which Tambrau essentially has in abundance during the rainy November-March period, (when the 2012-13 starvation was alleged to occur), it would take over a month to die.

During famines, the elderly and the young are the first to succumb, followed by adults who will die according to their pre-starvation physical condition and reserves of muscle and fat. In theory, the 95 alleged to have died in Kwoor would have been already the weakest. They would have been abandoned en masse as the stronger ones relocated, with those they

pada periode November-Maret (saat bencana kelaparan diduga terjadi pada tahun 2012 dan 2013) diperlukan waktu lebih sebulan bagi seseorang yang kelaparan untuk sampai pada kematian.

Selama masa kelaparan, orang lanjut usia dan anak muda adalah golongan pertama yang menyerah, diikuti oleh orang dewasa yang akan mengalami kematian berdasarkan kondisinya sebelum terpapar kelaparan dan tergantung pada cadangan otot dan lemaknya. Dalam teori, 90 orang yang diduga meninggal di Kwoor pastinya adalah orang-orang yang paling lemah. Mereka mungkin telah ditinggalkan secara massal oleh orang-orang yang lebih kuat untuk mencari lokasi lain bersama dengan beberapa orang yang mampu dibawa serta. Bahkan beberapa minggu dalam kondisi kelaparan seperti itu, orang terkuat saja yang bisa mencapai pesisir, menyeret atau menggendong anggota keluarga mereka yang lebih lemah beserta anak-anak. Begitu mereka mencapai pantai, berita tentang kehadiran mereka pastilah menyebar melalui kamera HP, SMS, dan gerakan kemanusiaan di Sausapor dan Sorong. Sebuah cerita seperti yang dipublikasikan Suara Papua pastinya akan menjadi awal dari berita besar.

Kondisi seperti kelaparan massal, di tanah yang kaya, adalah hal yang mustahil kecuali orang-orang sengaja tidak diberi makan karena sumber makanannya ditahan. Walaupun demikian, menahan sumber pangan bukanlah hal yang mudah karena, tidak seperti beras, makanan di sana tidak disimpan di antara musim panen dan waktu konsumsi. Satu-satunya cara adalah dengan menahan orang di daerah yang tidak memungkinkan bagi orang untuk meramu. Sebuah contoh buruk pernah terjadi di bawah militer Indonesia, terjadi di Lalerek Mutin, Timor Timur pada tahun 1983 sehingga dugaan kelaparan menjadi lebih masuk akal bagi mereka yang melihat Papua dalam bingkai genosida - hal yang lebih disukai oleh para pendukung kemerdekaan. Kita sering mengasosiasikan genosida dengan gambaran struktur fisik seperti kamp atau lapangan tandus yang dikelilingi kawat berduri. Di Papua, gambaran seperti ini, tentu saja tidak masuk akal.

Sewaktu berada di Tambrau, saya tidak melihat satu pun petugas TNI maupun Polisi. Satu-satunya tanda kehadiran pelindung rakyat di Kwoor adalah monumen beton tua berlumut peninggalan era Soeharto yang dibangun program ABRI Masuk Desa sekitar tahun 1993, dimana saat itu tentara dari Komando Militer Cenderawasih melakukan latihan 'memenangkan hati dan pikiran' dengan mendirikan sebuah bangunan dan membuka pelayanan kesehatan. Alih-alih militer, di Tambrau saya melihat apa yang biasanya saya jumpai di daerah pemekaran: kegagalan dan ketidakhadiran. Orang-orang Papua di Kwoor menjalani hidup seperti biasa, berjalan kaki, menggunakan perahu dan sampan, dengan hanya sedikit polosan negara yang tanpa dalam wujud bangunan yang tertutup, jalanan yang rusak, infrastruktur yang tak digunakan, dan tumpukan kayu yang ditakdirkan untuk dunia luar.

cared enough to assist. Even a few weeks into such a famine, the strongest would have reached the coast, dragging along or carrying their weaker members and children. Once on the coast the news of the exodus would have spread, through mobile phone cameras, sms, and the frantic movement of ailing humanity to Sausapor and Sorong. A story such as Suara Papua's would have been the beginning of a deluge.

Such a condition of mass starvation, in such a land of plenty, would be impossible unless people were purposely denied food through the seizure of livestock and forest crops. However, such crops are notoriously hard to confiscate because, unlike rice, they are not stored between harvest and consumption. The only way this could happen is through detention in an area where the ability to forage was denied. A precedent, created by the Indonesian military, occurred in Lalerek Mutin, East Timor, in 1983, so the starvation allegation is more plausible to those viewing Papua through the prism of genocide favoured by many advocates of independence. We often associate genocide with images of physical structures like camps or barren fields surrounded by concertina wire. In Papua, of course, such images are absurd.

In my time in Tambrau, I did not see a single soldier or police officer. The only evidence of the military in Kwoor is a mossy old concrete monument from the nationwide Suharto-era ABRI Masuk Desa (the military enters the village) campaign, circa 1993, where soldiers from the Cenderawasih Military Command conducted a 'winning hearts and minds' exercise by constructing new buildings and providing health services. Instead of the military, in Tambrau I saw what I usually see in pemekaran districts: failure and absence. Papuans in Kwoor go about their lives as they always have, on foot or by boat and paddle, with only the slightest airbrushing of the state upon them, mostly visible in shuttered buildings, crumbling roads, useless infrastructure and stacks of planed wood destined for the outside world.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis bekerja pada beberapa project kesehatan, pendidikan dan tata pemerintahan di kawasan timur Indonesia serta sering mengunjungi Papua dan Papua Barat. Artikel ini juga dapat dibaca di <http://independent.academia.edu/BobbyAnderson/>.

Bobby Anderson (rubashov@yahoo.com) works on health, education, and governance projects in Eastern Indonesia, and travels frequently in Papua and West Papua. This and other articles on Indonesia can be found at <http://independent.academia.edu/BobbyAnderson/>.

Program Mitra - BASICS Perencanaan Kesehatan Berbasis Data Di Kabupaten Minahasa Utara

akan gambaran kurang jernih mengenai kondisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Padahal data sangat penting untuk menciptakan pelayanan yang baik. Sebuah pilot project kerjasama antara Proyek Mitra Minahasa Utara dimulai pada pertengahan tahun 2010. Untuk meningkatkan pengumpulan dan rekapitulasi data, juga untuk memastikan data yang dapat diakses dan menjadi rujukan bersama adalah yang berkualitas baik. Data yang kurang baik berimbas antara lain pada sulitnya menghitung Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kurang efektifnya pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan.

Perihal ini menjadi sangat penting mengingat ketersediaan data valid dan regular dari level desa merupakan syarat pertama dari hadirnya rekapitulasi dan analisis data yang bermutu. Kondisi ini menciptakan kebutuhan untuk lebih serius menangani kerja pengumpulan dan pengolahan data sejak dari level terbawah. Ini berarti menyediakan segala perangkat yang dibutuhkan untuk memudahkan para petugas di

Foto: Dok. BASICS/Yusuf Ahmad

unit-unit pelayanan level bawah, agar data yang dapat tercatat dengan baik dan terhimpun dalam sistem penataan yang efektif.

Masalah Pengelolaan Data

Kami mencatat beberapa masalah dalam pengelolaan data. Pertama, belum ada format pencatatan yang efektif dalam pengumpulan data. Banyak format pengumpulan data dengan berbagai pengulangan data, serta deskripsi operasional yang terbatas. Keduanya membuat pengelolaan data sering harus dilakukan secara manual.

Masalah pengelolaan data yang kedua adalah data berulang. Data yang sama sering dikumpulkan secara berulang dan bukan merupakan pemutakhiran. Sumber data yang sama sering menghasilkan informasi berbeda untuk keperluan beragam. Selain itu rekapitulasi data minim dari Puskesmas dan tidak ada data induk (master data) di Dinas Kesehatan yang terkoneksi dengan Puskesmas-Puskesmas, yang dapat digunakan oleh seluruh bagian/bidang di Dinas Kesehatan.

Pengelolaan data yang buruk juga dapat menyebabkan penghitungan Indikator Pencapaian (IP) SPM menjadi tidak memadai, hanya mengandalkan angka persentase, tanpa dukungan data yang bisa dipertanggung jawabkan yang menghasilkan angka tersebut. Selain itu tupoksi SKPD melakukan pembinaan teknis pelayanan dasar dan perencanaan, pemantauan dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan dengan benar karena kurangnya hasil analisis dengan dukungan kedalaman data. Pelaksanaan program juga dilakukan dengan sumber data terbatas.

Belum ada SOP yang mengatur pengelolaan data di Kabupaten.

Menata Data

Dengan dukungan proyek BASICS, sekitar pertengahan tahun 2010 Dinas Kesehatan Minahasa Utara mulai membangun sistem pengelolaan data yang dapat menjamin ketersediaan data berkualitas, mulai dari kerja pengumpulan, pencatatan, pelaporan, hingga analisa. Ini merupakan langkah awal uji coba untuk mengetahui apakah sistem baru ini dapat menjamin ketersediaan data.

Hal pertama yang dilakukan adalah menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengikat untuk pelaksanaan pengelolaan data. SPO yang telah disusun ini mengatur pengolahan data, pengaturan pelaksana tugas sampai ke unit/satuan pelayanan, dan aturan wewenang penugasan. Tenaga ini sekurangnya telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Langkah kedua menata data adalah mengkompilasi data. Data pelayanan yang

berjumlah besar dan sering berulang, disederhanakan dan disatukan ke dalam data induk (master data), yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Kompilasi data ini sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan, dan ditata di dalam program aplikasi komputer. Program aplikasi yang diperlukan adalah program sederhana seperti MS Excel yang dibuat untuk dua tempat berbeda, yakni di Dinas Kesehatan dan di Puskesmas.

Serangkaian pelatihan diperlukan dan diselenggarakan menurut peringkat, yaitu pelatihan bagi operator untuk penanganan data, pelatihan bagi pengelola untuk pengolahan data, dan pelatihan bagi manajemen untuk analisis data dan pelaporan informasi. Pelatihan peringkat operator diberikan kepada Puskesmas. Pelatihan peringkat pengelola diberikan kepada Dinas Kesehatan, Bidang Perencanaan. Sedangkan pelatihan peringkat manajemen diberikan kepada Bidang Program di Dinas dan Kepala Puskesmas.

Setelah mengikuti pelatihan, perlu dilakukan pendampingan teknis yang menyangkut perhitungan Indikator Pencapaian (IP) SPM atas cakupan pelayanan yang telah diberikan dalam tahun berjalan, analisis kesenjangan antara hasil perhitungan IP SPM dengan angka yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dan perhitungan proyeksi IP SPM tahunan sampai dengan batas tahun yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Data historis tidak mudah diperoleh untuk SPM Bidang Kesehatan, misalnya data historis penyebab kematian ibu hamil/bersalin/nifas/komplikasi kebidanan secara spesifik dan bukan secara umum disebutkan misalnya karena 'terlambat'.

Tantangan

Sejumlah tantangan yang ditemui dalam mengembangkan sistem pengelolaan data terpadu ini cukup beragam. Salah satu yang cukup penting adalah kecenderungan pengelolaan dan penggunaan data yang masih cenderung top-down sehingga kerap mengabaikan informasi yang dapat dikumpulkan dari level terbawah.

Kendala pengumpulan data sudah muncul di level terbawah. Bidan hanya diminta mencatat jumlah kelahiran dan memindahkannya ke dalam laporan untuk dikirim ke Puskesmas. Pada tahap validasi data yang dilakukan Dinas Kesehatan, seringkali ditemukn ketidakcocokan data antar-bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten. Apalagi validasi data berjenjang tidak berjalan dengan lancar. Saat itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka menggunakan data yang disepakati bersama.

Di awal pendekatan berbasis data ini diterapkan, sulit menemukan ketegasan mengenai data yang

digunakan. Misalnya, kesepakatan untuk memakai data Sistem Informasi Kesehatan (SIK) demi menyatukan data semua bidang ternyata tidak berjalan.

Masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten masih menghimpun data untuk secara terpisah untuk keperluan masing-masing. Dalam unit data yang sama, selalu ada data yang menunjukkan angka berbeda, dan masing-masing bidang/bagian mempertahankan validitas data mereka. Ini kerap berujung pada 'bentrok' antara SIK dan bidang/bagian.

Isu ini sebenarnya dapat ditangani dengan dukungan Dinas Kesehatan Provinsi yang memberlakukan ketetapan 'satu pintu' untuk pengumpulan dan pengelolaan data, misalnya lewat Balai Data Provinsi. Balai Data inilah yang menghimpun data dari berbagai bidang maupun Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang ada dalam lingkup Dinas Kesehatan Provinsi.

Ketidaksesuaian dan inkonsistensi data yang dihimpun secara terpisah pada masing-masing bidang/bagian dalam lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi dapat menjadi masalah bila diperlukan pemutakhiran data dan bila data tersebut dibutuhkan pada level nasional.

Persoalan pengelolaan data juga bisa bersumber dari hambatan-hambatan yang erat kaitannya dengan kebijakan dan peraturan di level Pemerintah Kabupaten. Salah satu masalah terkait ini adalah mutasi. Tidak jarang mutasi terjadi pada pengelola Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas. Ini membuat pengganti mereka harus belajar ulang sebelum dapat mengoperasikannya dengan baik.

Di balik seluruh pencapaian di atas, komponen belanja langsung pada APBD untuk peningkatan kapasitas pengelolaan data masih rendah. Pengembangan manajemen data dan pelatihan SDM pada APBD termasuk dalam belanja langsung peningkatan kapasitas. Dengan keterbatasan APBD dan prioritas politik anggaran, alokasi belanja untuk itu masih rendah, bahkan untuk belanja langsung program pelayanan alokasinya hanya sedikit meningkat.

Kebanyakan pengembangan sistem manajemen data belum dilengkapi dengan perhitungan keuangan. Pengelolaan data yang telah disampaikan di atas dikembangkan pada tahun 2010 sampai tahun 2011. Perhitungan kebutuhan keuangan untuk pencapaian SPM kemudian dikembangkan pada tahun 2012 karena akan adanya alokasi dana dari provinsi.

Pembelajaran

Intensitas kerja. Membangun sistem berarti memulai dari kajian tentang yang ada dan

kebutuhan untuk pengembangan tersebut. Setelah itu barulah pekerjaan pengembangan sistem bisa dimulai. Ini berbeda dengan menerima desain sistem yang datang dari level atas dan tinggal menjalankannya.

Fokus di level bawah. Sebagian besar kerja pelayanan, dan dengan begitu pengumpulan data, berlangsung pada level paling bawah. Diperlukan upaya untuk mengubah persepsi demi meyakinkan berbagai pihak terkait bahwa ketika data dari bawah sudah terjamin, kerja selanjutnya akan lebih mudah. Hal serupa juga seharusnya terjadi dalam penganggaran. Bila dana yang dialokasikan untuk pelayanan sudah minim, untuk pengelolaan data umumnya lebih sedikit lagi.

Meningkatkan pengetahuan. Tim pengelola data di Puskesmas perlu menambah pengetahuan, karena orientasi mereka terhadap data menjadi jauh lebih tinggi. Mereka harus dapat memahami dengan baik Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten dengan anggaran APBD.

Mendedikasikan staf khusus untuk mengelola data. Kerja pengelolaan data di level Dinas Kesehatan Kabupaten, misalnya, lumayan menyita waktu dan tenaga. Karena itu, staf yang melaksanakannya selayaknya bukan merupakan tugas yang 'dipinjam' dari bidang lain. Ketika orang tersebut tidak fokus ke tugas utamanya, maka tugas tersebut akan sedikit terbelengkalai, demikian pula sebaliknya.

Input data berkala (bulanan). Sistem ini belum mampu menyelesaikan soal penganggaran, bukan karena masalah di dalam sistem itu sendiri, namun karena data yang belum tersedia secara teratur. Data tahunan (Profil Kesehatan) dan triwulan memang sudah tersedia, namun tidak demikian dengan data bulanan dari Puskesmas (Laporan Bulanan). Setiap bidang hendaknya dapat memasukkan data secara terintegrasi dengan menggunakan format yang sama.

Data, unit cost, dan penganggaran. Penghitungan biaya per unit pelayanan (unit cost) sangat bergantung kepada ketersediaan data. Tanpa data, unit cost tak dapat dihitung. Sementara ketersediaan data dibangun dari sistem pengelolaan data yang bermutu.

Tanpa sistem yang baik, sulit untuk mendapatkan data bermutu, karena keberadaan dan mutu data tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, sistem ini sangat diperlukan agar data betul-betul dapat menjamin akurasi kebutuhan anggaran.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada website Proyek BASICS :

www.basicsproject.or.id

PRESS CONFERENCE

PELUNCURAN PAKET BUKU

*"Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak"
dan
"Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisis Data Terpilah untuk
Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah"*



KM BaKTI-AIPD

Peluncuran Paket Buku Panduan Pendukung Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Daerah

Oleh **Junaedi Uko**

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beberapa waktu lalu meluncurkan paket buku pedoman teknis untuk mendukung pembangunan gender di Indonesia. Paket buku tersebut adalah 'Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak' serta 'Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisa Data Terpilah untuk Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah'.

Peluncuran dilakukan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili oleh Sesmen (Sekretaris Menteri), Sri Danti Anwar, MA. Hadir pada acara tersebut perwakilan kementerian dan sejumlah lembaga negara, unsur pemerintah daerah, serta aktifis dan penggiat isu-isu gender. Penyusunan dan peresmian buku

tersebut didukung sepenuhnya oleh program AIPD (Australia Indonesia Partnership for Decentralisation) sebagai bagian dari upaya untuk mendorong perbaikan kualitas layanan publik melalui pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender.

Inisiatif Positif

Peningkatan kualitas hidup kaum perempuan di Indonesia, sesungguhnya sudah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Perhatian itu bahkan sudah dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden no 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa tujuan dari PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender.

Ini adalah sebuah strategi yang dirancang untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui Inpres ini, setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan akan responsif terhadap kebutuhan akan terwujudnya kesetaraan pemanfaatan pembangunan oleh warga laki-laki dan perempuan.

Semenjak Instruksi Presiden tentang PUG ini dikeluarkan, perubahan positif memang sudah mulai nampak. Sejumlah lembaga dan institusi pemerintahan, mulai dari level Kementerian hingga ke Pemerintah Daerah, secara politis menindaklanjuti Inpres ini dengan menyusun peraturan tentang pelaksanaan PUG di institusinya masing-masing. Tidak hanya sampai disitu, berbagai macam program dan kegiatan yang sifatnya responsif gender perlahan-lahan ditingkatkan baik secara kualitas dan kuantitas. Sebagai hasil, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Pentingnya Data terpilah

Namun begitu, implementasi dari Instruksi Presiden tentang PUG masih meninggalkan banyak catatan. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) menunjukkan adanya tingkat pencapaian kesetaraan gender yang tidak merata baik di tingkatan Lembaga/Kementerian ataupun Pemerintah Daerah.

Kementerian PP dan PA sendiri telah menerbitkan peraturan mengenai pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai bentuk implementasi dari Inpres PUG ini. Melalui PPRG ini, diharapkan akan ada alokasi dan perhatian yang lebih baik terhadap kaum perempuan. Hanya saja PPRG belum berjalan optimal karena belum adanya data dan informasi yang secara akurat bisa memetakan situasi dan kondisi gender. Data-data yang ada terlalu bersifat umum karena tidak mengkategorisasi secara spesifik antara laki-laki, perempuan serta anak-anak. Data-data tersebut sulit untuk dijadikan acuan dalam mewujudkan perencanaan penganggaran yang responsif gender.

Saat memberikan sambutan pada acara peluncuran buku tersebut, Sesmen Kementerian PP dan PA, Sri Danti Anwar memaparkan situasi ini. "Dalam pelaksanaannya, PPRG memerlukan hasil analisis gender yang membutuhkan data terpilah, yaitu data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai data pembuka wawasan dan sekaligus sebagai input pelaksanaan analisis gender dan anak. Namun, ketersediaan data terpilah di Kementerian/Lembaga dan daerah masih sangat terbatas, dan hal ini menjadi permasalahan utama mengapa pelaksanaan PPRG menjadi terhambat," paparnya.

Masih minimnya informasi atau data terpilah pada Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah sebagaimana yang diungkapkan oleh Sri Danti Anwar diatas memang patut mendapat perhatian. Pasalnya, untuk dapat mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, keberadaan data atau informasi terpilah (antara laki-laki dan perempuan) sangat penting sebagai bahan acuan untuk melakukan analisis kebutuhan. Melalui data terpilah, kondisi dan permasalahan gender bisa diidentifikasi serta dipetakan. Dari situ, bisa dirancang strategi dan kebijakan yang tepat. Sebaliknya, jika data terpilah semacam ini tidak tersedia, bisa jadi permasalahan gender yang ada tidak akan nampak dan karenanya tidak mendapat perhatian.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Armida S. Alisjahbana, dalam sambutannya yang diwakili oleh Dr. Slamet Seno Adji, MA (Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS) di acara Launching tersebut juga menyoroti persoalan ini. Menurutnya, keberadaan data terpilah telah



menjadi kendala semenjak Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional ini dikeluarkan.

Evaluasi yang dilakukan oleh lembaganya dalam 2 tahun terakhir, menunjukkan pendataan secara terpilah belum berjalan optimal. Upaya penyediaan dan pemutakhiran data terpilah juga belum dilakukan secara sistematis dan berkala. Padahal ketersediaan data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin merupakan salah satu prasyarat dalam melaksanakan PUG.

Kebutuhan Sebuah Pedoman Bersama

Masih terbatasnya ketersediaan data terpilah di Kementerian/Lembaga dan daerah dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran dan kepedulian dari para pengambil kebijakan perihal pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Selain itu, adanya persepsi dan pemahaman yang berbeda tentang data terpilah juga sesungguhnya turut berkontribusi terhadap terhambatnya penyediaan data terpilah ini.

Berangkat dari permasalahan ini, program AIPD kemudian mengambil inisiatif untuk menyusun

buku pedoman teknis penyusunan data terpilah untuk memenuhi kebutuhan perencanaan penganggaran yang responsif gender. Buku berjudul 'Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisa Data Terpilah untuk Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah' ini berisikan berbagai macam informasi teknis, mulai dari bagaimana menentukan jenis data berbasis gender, bagaimana menyusun dan menyajikan data terpilah, bagaimana melakukan identifikasi masalah terkait gender, bagaimana melakukan analisis, hingga bagaimana mengintegrasikan hasil analisis tersebut ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Sejumlah contoh data terpilah yang sudah pernah dilakukan di beberapa daerah turut juga dimunculkan disini. Selain hal-hal teknis tersebut, isi buku ini juga memberikan penjelasan tentang pentingnya data terpilah dalam konteks pembangunan yang responsif gender di Indonesia. Keberadaan buku pedoman ini memperkuat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, yang diluncurkan pada hari yang sama.



Apresiasi Pihak terkait

Pihak Bappenas sangat mengapresiasi diterbitkannya paket buku pedoman ini seraya menaruh harapan agar nantinya bisa memberi banyak masukan penting bagi para pengambil kebijakan di Indonesia dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional yang responsif gender. Secara spesifik, paket buku pedoman tersebut dapat memberi sumbangsih pada implementasi dari strategi nasional perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sehingga pada akhirnya akan turut berkontribusi pada pencapaian Millennium Development Goals (MDG's).

Sementara bagi Kementerian PP dan PA, paket buku pedoman ini diharapkan akan menjadi acuan bersama dalam menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pentingnya ketersediaan data terpilah. Lebih dari itu, paket buku ini juga bisa memberikan pengetahuan teknis bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender di institusinya masing-masing. Kementerian PP dan PA juga secara khusus memberikan apresiasi terhadap peran dan dukungan yang telah diberikan oleh AIPD dalam penyusunan buku pedoman ini, dan berharap agar

kerjasama seperti ini akan terus berlanjut di masa mendatang.

Terwujudnya PPRG pada akhirnya akan sangat bergantung pada berbagai pihak yang terkait. Bukan hanya lembaga atau instansi pemerintahan sebagai pemangku kebijakan, tetapi juga masyarakat luas secara umum. Oleh karenanya, sangat diharapkan agar kelompok-kelompok masyarakat, kalangan akademisi serta dunia usaha bisa memanfaatkan informasi-informasi yang telah tersedia, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan kaum perempuan di Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Communication Officer KM BaKTI -AIPD. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Buku Pedoman Teknis, Anda dapat menghubungi Chandra Sugarda (Gender Specialist Program AIPD) melalui email chandra.sugarda@aipd.or.id dan Layanan Informasi AIPD info@aipd.or.id. Bagi yang ingin memperoleh softcopy dari buku tersebut, file-nya dapat diunduh di website AIPD: <http://aipd.or.id/id/guideline-for-preparation-and-analysis-of-dissagrated-data-as-part-of-gender-mainstreaming-in-governance/>



Kejahatan tindak pidana narkoba tergolong unik. Bila pada umumnya seseorang yang divonis telah melakukan kejahatan tindak pidana mendapat hukuman penjara, maka hukuman ini semestinya tidak diberlakukan kepada pengguna narkoba. Mereka yang tertangkap sebenarnya memerlukan pemulihan atau pelayanan rehabilitasi, baik medis maupun sosial.

Foto <http://supportdontpunish.org>

MENGAPA KORBAN NAPZA HARUS DIDUKUNG BUKAN DIHUKUM

Oleh **Farid Satria**

World Drug Report yang diterbitkan UNODC, Organisasi PBB yang menangani narkoba dan kriminal, menyebutkan terdapat sekitar 315 juta orang berusia produktif (15-64 tahun) yang menjadi pengguna narkoba dan tak kurang dari 200 juta orang meninggal setiap tahunnya karena penyalahgunaan narkoba.

Ada dua faktor yang menyebabkan tingginya angka pengguna narkoba dan tingginya angka kematian akibat penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). Yang pertama adalah banyaknya jumlah narkoba yang beredar dan kedua, rendahnya angka pemulihan bagi para pengguna narkoba.

Pada tahun 2004 prevalensi pengguna narkoba di Indonesia hanya sebesar 1,75 persen namun pada tahun 2011 naik menjadi 2,2 persen. Angka prevalensi ini terjadi pada penduduk berusia antara 10 hingga 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang antara lain memberantas peredaran gelap narkoba. Dari program ini terjadi peningkatan hasil pengungkapan kasus dan tersangka kejahatan narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari kejahatan narkoba. Sejak tahun 2010 saja telah terungkap 108.701 kasus, dengan jumlah tersangka 134.117 orang. Dari kasus yang ditangani, terdapat 40 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sebesar Rp 163,1 milyar.

Dilema Hukum Korban NAPZA

Sebelum tahun 2009, penyalahguna NAPZA di mata hukum ditindak berdasarkan dengan KUHP Pasal 55 dan 56. Ini berarti penyalah guna narkotika dipandang sebagai pelaku tindak kejahatan dan dikenakan hukuman pidana, yang berarti berkonsekuensi hukuman kurungan badan atau dipenjara.

Namun penjara bukanlah tempat yang tepat bagi penyalahguna NAPZA yang membutuhkan terapi medis dan rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Hal-hal tersebut tidak diperoleh para pengguna narkoba di dalam penjara.

Sejak tahun 2009, telah lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Karenanya, sesuai kebijakan tersebut sesuai maka penyalahguna narkotika secara hukum dipandang sebagai korban dan karenanya memiliki hak untuk direhabilitasi.

Konsep baru yang memandang para pengguna NAPZA sebagai korban lahir dari pengalaman yang menunjukkan bagaimana para penyalah guna narkotika yang terjerat hukum dan dipenjara tidak serta merta menghentikan mereka dari kecanduan narkotika. Sering kali, para penyalah guna narkoba pemula yang terjerat hukum saat berada di penjara berinteraksi dengan para pengguna senior bahkan menjadi dekat dengan bandar narkoba. Walhasil, saat keluar dari penjara, para pengguna pemula ini menjadi lebih mahir menyalahgunakan narkoba atau bahkan menjadi kaki-tangan pengedar narkoba.

Selama kurun waktu 2010 sampai 2014, sebanyak 34.467 residen telah direhabilitasi. Ini berarti hanya sekitar 25,7 persen dari jumlah total tersangka pada kurun waktu tersebut yang mendapatkan hak rehabilitasi medis dan sosial.

Secara nasional, rehabilitasi bagi korban NAPZA juga diupayakan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain adalah meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban NAPZA, terutama yang berbasis masyarakat, meningkatkan koordinasi intra dan interinstansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat.

Kementerian Sosial juga tengah mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pencegahan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial korban NAPZA disamping mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban NAPZA, baik secara fisik maupun sumber daya manusia, dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial.

Sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan NAPZA, baik secara fisik maupun sumber daya, dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial juga tengah dikembangkan bersama dengan mengembangkan



dan menyediakan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan NAPZA.

Di Sulawesi Selatan, korban NAPZA dan orang dengan virus HIV/AIDS (ODHA) Pemerintah telah berkomitmen untuk memfasilitasi tempat rehabilitasi yang berfungsi untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas hidup korban NAPZA. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ir. H. Agus Arifin Nu'mang pada Sosialisasi Persiapan Pembinaan dan Bimbingan Pelatihan NAPZA yang digelar Biro Bina NAPZA dan HIV/AIDS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 8 Agustus silam. Beberapa kendala memang masih dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, serta keterbatasan kuantitas dan kualitas tenaga teknis.

Kampanye *Support Don't Punish!*

Support don't Punish adalah kampanye global yang menyerukan kepada pemerintah untuk mengakhiri *War on Drugs*, sebuah kebijakan yang diinisiasi tahun 1971 oleh Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, dalam menanggulangi permasalahan NAPZA yang banyak diikuti oleh pemerintah negara lain. *War on Drugs* yang menyedot biaya sangat besar terbukti gagal mengatasi permasalahan NAPZA, memicu epidemi HIV, TB, dan hepatitis, serta menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

Kampanye ini lahir dari semakin besarnya resiko yang dihadapi oleh pengguna NAPZA akibat kecurigaan, ideologi dan politik. Kampanye ini juga dimotivasi keinginan yang besar untuk memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan

mereka yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, termasuk keluarganya dan masyarakat di sekitarnya.

Tujuan kampanye ini adalah mengubah undang-undang dan kebijakan yang mempengaruhi dampak intervensi pengurangan penggunaan narkoba, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kriminalisasi bagi korban NAPZA, meningkatkan pemahaman akan pentingnya memperhatikan layanan kesehatan dan dukungan lain bagi korban NAPZA, mempromosikan hak-hak azasi dan dukungan publik bagi korban NAPZA.

Di Indonesia, kampanye ini didukung dan dilakukan pula oleh Rumah Cemara dan Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI), termasuk Persaudaraan Korban NAPZA Makassar (PKNM)

Lawan stigma, dukung dan jangan menghukum!

Persaudaraan Korban NAPZA Makassar (PKNM) adalah sebuah lembaga di Makassar yang berfokus pada penyadartahuan mengenai NAPZA dan melaksanakan berbagai upaya untuk rehabilitasi bagi korban NAPZA.

Dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2013 dan 2014 yang diadakan tanggal 26 Juni di Makassar, PKNM menggelar berbagai aksi untuk mendorong kesadaran Pemerintah dalam memberi dukungan bagi rehabilitasi pecandu NAPZA. Dalam peringatan ini, PKNM mengajak rekan-rekan mahasiswa, LSM peduli NAPZA dan HIV/AIDS, serta masyarakat umum untuk mendukung kampanye *Support. Don't Punish* serta membentangkan spanduk, dan membagikan flyer ukuran mini berisikan informasi terkait narkotika

Pada awal November silam, PKNM juga mengadakan pelatihan Peningkatan Kapasitas Melalui Metode Pengisian *Addiction Severity Index* (ASI). Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota organisasi korban NAPZA dalam menyediakan layanan rehabilitasi berbasis rumah (*home based care*) bagi pengguna NAPZA. *Addiction Severity Index* (ASI) adalah metode wawancara yang didesain untuk membahas tujuh area masalah potensial terkait status medis, dukungan dan pekerjaan, penggunaan NAPZA dan alkohol, status hukum, dan status sosial.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah aktivis penanggulangan bahaya NAPZA dan Hak Asasi Manusia dan dapat dihubungi melalui email faridykp2n@gmail.com

Program Penanggulangan Kemiskinan Bukan Sekedar *Bussiness As Usual*

Perlunya program kerja yang tidak hanya sekedar *business as usual*, namun perlu satu upaya yang sangat serius, terintegrasi dan sinergi untuk terus menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia.

(Presiden SBY Pada RKP 2013)

Oleh **Dr. Ahmad Zaini & Moh. Taquiuddin, S.Pt, M.Si**

Arahan ini sebenarnya mengindikasikan bahwa pola kerja pemerintah selama ini masih terjebak pada rutinitas belaka. Program pembangunan pada semua level pemerintahan berlangsung biasa saja dan terkesan hanya mengulang aktifitas serupa di tahun sebelumnya. Karya nyata aparat pemerintahan (pusat dan daerah) masih minim terobosan.

Cara kerja *bussiness as usual* dapat ditemukan pada implementasi berbagai ragam program penanggulangan kemiskinan. Siapapun pelaksana dan apapun jenisnya, upaya-upaya yang ada seringkali hanya mengatasi gejala daripada memahami akar masalah kemiskinan itu sendiri. Karena itu, jenis



intervensinya pun seragam dan seringkali berujung pada dua hal, yakni: distribusi bantuan (uang, ternak, bibit) dan penyediaan infrastruktur fisik. Sementara aktifitas peningkatan kapasitas sasaran agar mereka bisa 'keluar dari kemiskinan' cenderung diabaikan. Di sisi lain, kondisi ini makin diperparah dengan missing antar pelaksana program. Ego sektoral lebih mengemuka dan sinergisitas para pelaku pun masih lemah. Akibatnya, program penanggulangan kemiskinan justru menciptakan potensi dan situasi konflik baik di tataran pelaksana maupun program.

Problema kemiskinan begitu kompleks dan bersifat multi-dimensional. Kemiskinan bukanlah sekedar persoalan rendahnya kepemilikan aset berbagai sumber daya melainkan jauh lebih mendalam. Kemiskinan merupakan sebuah konsekuensi dari proses pembangunan yang cenderung menciptakan kondisi di mana *the winner take all, the looser getting nothing*. Karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus didasarkan pada semangat *not bussiness as usual*. Di mana, perubahan pola pikir aktor pembangunan merupakan sebuah keniscayaan dan harus diwujudkan dalam langkah-langkah kebijakan strategis.

Uraian dari *Policy Brief* berikut ini bersumber dari hasil penelitian "Analisa Partisipatif Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiasi Pemerintah Provinsi NTB dalam Skema 'NTB Bumi Sejuta Sapi' di Kabupaten Lombok Barat" pada tahun 2013.

Rilis statistik kemiskinan oleh pemerintah seringkali menuai polemik. Kondisi ini disebabkan karena publikasi angka-angka kemiskinan dinilai seringkali tidak sejalan dengan fakta keseharian. Diakui, metode pengukuran kuantitatif memiliki keterbatasan dalam menangkap dan memahami realita kemiskinan yang sesungguhnya terjadi. Berangkat dari kondisi inilah, pendekatan kualitatif-partisipatoris pun telah dikembangkan guna menggali perspektif alternatif terkait kemiskinan.

KATEGORI/ CIRI-CIRI	Kaya (Sugih) [3]	Cukup (sederhane) [2]	Miskin (Jeleng) [1]
Pekerjaan	PNS; Pengusaha; Petani Pemilik Lahan	Ojek; Pegawai Swasta; Petani Penyewa/ Penyakap/ Pengelola Lahan Orang lain; Tukang Bangunan	Buruh Harian; Buruh Lepas; Buruh Tani; Kuli Bangunan
[8]	[24]	[16]	[8]
Kepemilikan Lahan Sawah	> 0.1 Ha	0.03 s.d. < 0.1 Ha	Tidak memiliki lahan sawah
[7]	[21]	[14]	[7]
Kepemilikan Lahan Kebun	> 1 Ha	0.05 s.d. < 1 Ha	Tidak memiliki lahan kebun
[6]	[18]	[12]	[6]
Kepemilikan Ternak Sapi	> 5 Ekor	1 - 4 Ekor	Mengadap/ Memelihara Ternak Orang lain
[5]	[15]	[10]	[5]
Kepemilikan Aset Rumah Tangga	Mobil; Mesin Sawmill; Motor > 1 buah; Kulkas dan TV	Motor 1 buah; TV; Kulkas	Radio; Tdk memiliki TV dan Motor
[4]	[12]	[8]	[4]
Luas Areal Kelola HKm	> 1 Ha	0.25 Ha s.d. 0.99 Ha	< 0.25 Ha
[3]	[9]	[6]	[3]
Motivasi Untuk Bekerja Keras	Tinggi	Sedang	Rendah
[2]	[6]	[4]	[2]
Pendidikan Terakhir KK	SLTA	SLTP	SD
[1]	[3]	[2]	[1]
TOTAL SKOR	108	72	36
		108+72 : 2 = 90	72+36 : 2 = 54
KESEPAKATAN SKOR	91 - 108 55 - 71 72 - 90 36 - 54	= = = =	KAYA SEDANG LEBIH DARI CUKUP/ MENDEKATI KAYA MISKIN

Kemiskinan subyektif sendiri menekankan pemahaman pada konsep kemiskinan dari sudut pandang masyarakat miskin itu sendiri. Karena itu, sebuah komunitas atau kelompok masyarakat boleh jadi tidak menganggap diri mereka miskin meskipun menurut ukuran orang lain, mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Kajian terhadap dinamika kemiskinan lokal komunitas peternak di lokasi penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan subyektif berdasarkan refleksi anggota komunitas terhadap realita sekitarnya. Persepsi dan ciri-ciri kemiskinan dikembangkan sendiri melalui diskusi bersama oleh beberapa individu sebagai perwakilan dari komunitas peternak. Dengan demikian, penjelasan pada dinamika kemiskinan lokal di lokasi penelitian berikut ini merupakan sebuah gambaran kondisi kemiskinan berbasis representasi sosial dari komunitas peternak di Dusun Lebah Sempage Desa Lebah Sempage–Narmada, Lombok Barat.

Dalam bahasa Sasak, makna kesejahteraan menurut lokal adalah *molah* (hidup enak). Berdasarkan ukuran *molah* atau tidaknya, kehidupan seseorang individu ataupun sebuah rumah tangga di Dusun Lebah Sempage secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni : kaya, cukup dan miskin. Untuk membedakan ketiga kategori tersebut, para partisipan mengidentifikasi 8 hal sebagai pembeda: aset rumah tangga, pekerjaan, kepemilikan lahan sawah, kepemilikan lahan kebun, luas areal kelola hutan komasyarakat, jumlah kepemilikan ternak sapi, motivasi kerja dan pendidikan terakhir kepala keluarga. Dari kedelapan aspek pembeda tersebut, partisipan kemudian membuat urutan berdasarkan penilaian paling menentukan atau tidaknya dengan pemberian skor.

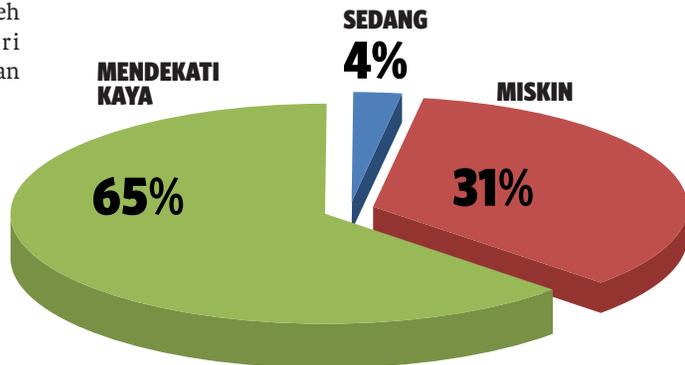
Untuk mengetahui siapa dan di mana keluarga miskin maka dilakukan sensus khusus pada semua KK peternak berdasarkan kriteria di atas. Jumlah responden pada sensus ini adalah 118 keluarga atau sekitar 30 persen dari total keluarga yang ada di Dusun Lebah Sempage (400 RT).

Untuk mengetahui layak tidaknya seorang KK menerima bantuan sapi, peneliti melakukan sensus kepada seluruh anggota penerima berdasarkan kriteria kemiskinan lokal yang telah disepakati. Hasilnya, tingkat kesejahteraan dari 22 KK penerima tersebut: kategori miskin (13 KK) dan sedang (9 KK). Artinya, sebagian besar anggota kelompok dinilai sangat layak menerima bantuan. Dari temuan ini dapat dikatakan bahwa program NTB BSS meskipun tidak didasarkan pada dinamika kemiskinan lokal dalam hal penentuan sasaran, namun ternyata para penerimanya memang rata-rata tergolong KK miskin sebagaimana kasus di Dusun Lebah Sempage.

Efektifitas Aktifitas Penanggulangan Kemiskinan: Praktik Lokal ataukah Program Pemerintah?

Dari semua program penanggulangan kemiskinan yang ada, penilaian tinggi pada semua aspek diberikan kepada sokongan (banjar kampung). Di lokasi penelitian, terdapat dua jenis praktik

Sebaran Tingkat Kesejahteraan Keluarga Peternak Berdasarkan Indikator Lokal di Dusun Lebah Sempage (N=118 KK)



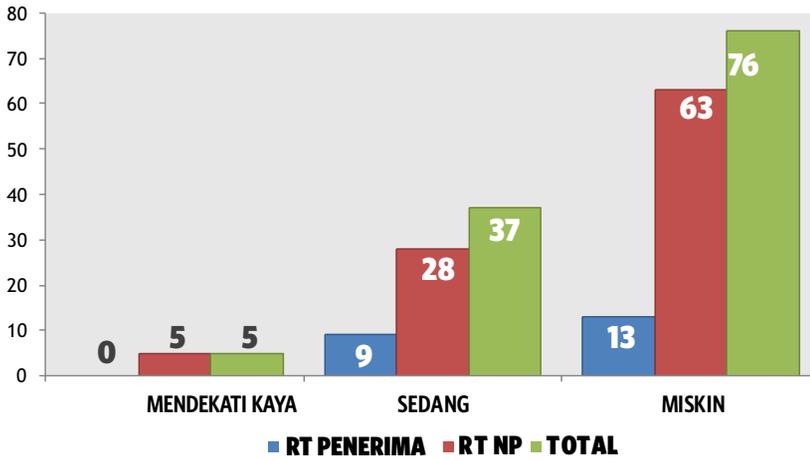
sokongan (dukungan), yakni sokongan kawin dan sokongan kematian. Sokongan kawin merupakan kesepakatan sejumlah rumah tangga (biasanya 10-12 KK) yang memiliki anak usia siap kawin dengan mengeluarkan beras sebanyak 25 kg per KK. Beras ini kemudian akan diberikan kepada keluarga yang melaksanakan hajatan ketika anak mereka kawin. Sementara, sokongan kematian adalah bentuk santunan masyarakat kepada keluarga yang sedang ditimpa musibah. Bentuk sokongan tersebut adalah setiap keluarga mengeluarkan beras 1 kg, kayu bakar 1 ikat, buah kelapa 2 biji dan uang sebesar Rp. 1.000,-.

Pola sokongan merupakan salah bentuk nyata dari kapital sosial yang fungsional di Dusun Lebah Sempage. Praktik ini telah tumbuh dan berkembang di dalam struktur sosial masyarakat atas dasar solidaritas. Karena itu, pola-pola semacam sokongan ini jauh lebih terjamin dan terpelihara keberlangsungannya dibandingkan intervensi program dari pihak luar. Semangat keswadayaan anggota masyarakat untuk menolong sesama begitu tinggi meskipun kondisi antar penolong dan yang ditolong itu sama-sama miskin. Bagi masyarakat, sokongan adalah salah satu kewajiban sosial yang harus ditunaikan.

Aspek Pemberdayaan Masyarakat Masih Menjadi Persoalan

Pasca bantuan diberikan, petugas Dinas Peternakan Provinsi kadang-kadang datang ke kelompok guna melihat perkembangan ternak bantuan dan mencatatnya. Menurut masyarakat sasaran, kedatangan petugas Dinas tersebut bukanlah sekedar kedatangan singkat untuk mencatat saja melainkan seharusnya sebuah kunjungan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan. Para peternak sangat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara

Sebaran RT Penerima dan Non Penerima Bantuan Sapi Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Lokal



beternak.

Beberapa pengurus kelompok memang pernah dilatih oleh Dinas Provinsi bahkan diajak berkunjung ke lokasi lainnya di luar pulau. Namun studi banding tersebut dinilai kurang memberikan hasil maksimal dalam hal peningkatan produktifitas ternak. Materi pelatihan di lokasi tersebut tidak bisa diterapkan ketika mereka kembali ke kelompoknya.

Fakta obyektif akan lemahnya aspek

pendampingan peternak dalam skema Program NTB BSS ini sejalan dengan hasil kajian Zaini yang menemukan bahwa belum banyak kegiatan terfokus pada pencapaian tiga sub-indikator utama NTB BSS (peningkatan kelahiran, penurunan angka kematian dan peningkatan pertambahan berat badan). Sebagian besar dana pada Dinas

Peternakan telah dialokasikan untuk penyebaran ternak dan penyelamatan betina produktif. Idealnya, percepatan pencapaian 3 target utama program hendaknya diarahkan program peningkatan kapasitas petugas yang diarahkan pada pendampingan peternak dan monitoring evaluasi program berbasis hasil. Karena itu, Program NTB BSS tampaknya lebih bernuansa distribusi ternak daripada maksimalisasi produktifitas ternak.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kajian terhadap kondisi lokal harus dilakukan oleh pelaksana program melalui analisa kualitatif-partisipatoris sebagai pendukung data dan informasi dari pemerintah (BPS). Pemahaman mendalam terhadap kondisi obyektif sasaran akan memudahkan pelaksana program untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: siapa dan dimana kelompok sasaran; pola pendekatan; siapa saja pihak yang mungkin bisa dilibatkan; kapan saat tepat bagi penyaluran bantuan.

Institusi lokal setempat dapat menjadi pintu masuk dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan. Pada kenyataannya, pola-pola semacam sokongan jauh lebih terjamin dan terpelihara keberlangsungannya. Karena itu,

program penanggulangan kemiskinan seyogyanya memanfaatkan keberadaan institusi lokal.

Penguatan kelembagaan penyuluh sebagai *agent of learning* dalam kerangka reorientasi pemberdayaan masyarakat guna menjamin keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya pemberdayaan masyarakat oleh penyuluh perlu diikuti dengan pendekatan aksi refleksi melalui dialog komunitas atas dinamika sosial kemasyarakatan berdasarkan analisa kondisi kekinian. Melalui dialog secara berkala, masyarakat sasaran akan menyusun rencana aksi bersama dalam jangka waktu tertentu dan melakukan monitoring evaluasi terhadap pencapaian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Policy Briefs disusun berdasarkan hasil penelitian **Moh. Taquiuddin, S.Pt, M.Si**, anggota JIKTI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berjudul **Analisa Partisipatif Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiasi Pemerintah Provinsi NTB Dalam Skema 'NTB Bumi Sejuta Sapi' di Kabupaten Lombok Barat**. Beliau dapat dihubungi melalui email mohtaqie@gmail.com

24-25 Oktober 2014
**Sosialisasi
PAUD
Holistik
Integrasi
Taman
Swialiparri
untuk
Block Grant**

Untuk meningkatkan partisipasi anak-anak pendidikan anak usia dini di Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten bekerja untuk mensosialisasikan dan membangun PAUD Holistik Integrasi TAMAN SIWALIPARRI (Tempat Aman dan Nyaman, Stimulasi, Intervensi, Perawatan, Perlindungan, Pendidikan Anak Mandar Mandiri).

Program ini adalah program pelayanan pendidikan serta mengembangkan pendidikan anak sejak dini yang holistik dan terintegrasi. Holistik tidak hanya untuk merangsang aspek pendidikan untuk anak sejak dini tetapi juga untuk merangsang aspek gizi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Terpadu berarti bahwa layanan pendidikan ini dioperasikan bersama dengan layanan lainnya seperti posyandu, BKR, stimulasi dan deteksi dini untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan alasan di atas, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan koordinasi yang erat dengan UNICEF akan mendirikan 25 pusat PAUD HI Taman SIWALIPARRI di Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka UNICEF-BaKTI dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Sosialisasi PAUD Holistik Integratif (HI) dari segi afektif untuk Blog Grant.

Sosialisasi PAUD HI diikuti oleh 79 peserta yang berasal dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pengelola/penyelenggara PAUD (25 PAUD), SKPD terkait. Narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut: Perwakilan dari Direktorat PAUD Kemendikbud, Spesialis Pendidikan (UNICEF Jakarta), Koordinator UNICEF Makassar, dan Bupati Polman. Acara dibuka oleh Wakil Bupati Polman.

Foto Dok. BaKTI



5 -6 November 2014

Pertemuan Finalisasi Peraturan Bupati Bulukumba Terkait Eliminasi Malaria

Dinas Kesehatan Bulukumba didukung UNICEF dan BaKTI merampungkan Peraturan Bupati terkait eliminasi malaria melalui Pertemuan lintas program dan sektor di Bulukumba. Kegiatan ini melibatkan unsur Dinas Kesehatan dan perwakilan SKPD di Bulukumba. Hadir pula dr. Gercelina Silaen, UNICEF Makassar dan Leonardy dari BaKTI.

Narasumber dalam kegiatan ini diantaranya Dr. dr. H. Abd. Gafar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan Nur Jali SH,MH, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba. Dr.dr.H.Abd Gafar memaparkan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Bulukumba terkait Pengendalian Malaria yang salah satunya melalui Peraturan Bupati.

Melalui kebijakan tersebut, diharapkan pengalokasian anggaran untuk eliminasi malaria semakin meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba juga menambahkan bahwa Pemerintah Daerah Bulukumba menargetkan kasus malaria *Annual Parasite Incident* (API) menjadi 0 (*zero*) pada tahun 2017 dan memperkuat integrasi materi malaria pada kurikulum SD serta rencana kurikulum akademi kebidanan/keperawatan. Terkait isi materi Peraturan Bupati, Nur Jali SH,MH, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, memaparkan detail isi dari Draft Peraturan Bupati termasuk ketentuan umum dan pasal perpasal sesuai ketentuan perundangan serta input dari peserta pertemuan.

Hasil yang dicapai dalam pertemuan adalah telah disepakati dan dirumuskannya finalisasi Peraturan Bupati Bulukumba terkait eliminasi malaria. Rencananya dokumen ini akan segera diajukan kepada Bupati Bulukumba untuk ditandatangani bulan Desember mendatang.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan kolaborasi UNICEF-BaKTI, Anda dapat menghubungi Senior Program Officer UNICEF-BaKTI, Sdr. Leonardy Sambo melalui email leonardy@bakti.or.id

Foto Dok. BaKTI





Foto Dok. WVI

Program Mitra
Wahana Visi Indonesia

Air Bersih Membawa Harapan ke Mangu

Clean Water Brings Hope to Mangu

Oleh **Rena Tanjung**

Mereka biasa pergi sebelum subuh menjelang, berjalan beriringan melalui jalan setapak untuk mengambil air dari mata air di puncak bukit yang jaraknya sejauh satu kilometer. Lalu ada bagian yang sulit: mereka harus membanting tulang bolak-balik mengangkat delapan botol air. Keesokan harinya, mereka akan pergi lagi, mengulang hal yang sama, selama bertahun-tahun.

Ningsih jarang mandi, bukan karena ia malas, namun karena jalanan ke sumber air terdekat terlalu curam dan membosankan.

Kini Ningsih bisa mandi kapan saja ia mau karena Wahana Visi Indonesia, mitra dari World Vision, telah mendatangkan air bersih ke desanya di Sulawesi, Indonesia.

Ningsih rarely took a bath, not because she was lazy, but because it was a tedious uphill trek to the closest water source on her Indonesian island of Sulawesi.

Now she can bathe whenever she wants because Wahana Visi Indonesia, a World Vision partner, has brought clean water to her village.

They would leave before dawn, stumbling along the well-worn track to fetch water from a hilltop spring a kilometre away. Then it was the hard part: the backbreaking trudge back carrying as many as eight bottles of water each. The next day, they would go again – and they did, for years.

Life is easier now thanks to a project to install a communal water tank in the village of Mangu, near the city of Palu on the K-shaped Indonesian island of Sulawesi. Wahana Visi Indonesia (WVI), a World Vision partner, organised the 2013 project in

Hidup kini menjadi lebih mudah berkat sebuah program pembangunan tangki air bagi masyarakat di Desa Mangu, dekat dari Kota Palu, di sebuah pulau berbentuk huruf K di Indonesia yang bernama Sulawesi. Wahana Visi Indonesia (WVI), sebuah mitra World Vision, pada tahun 2013 telah mengorganisir sebuah program kerjasama dengan Pemerintah Kota Palu.

Ningsih tersenyum malu dan saat menceritakan kegembiraannya bisa mandi di rumah. Setiap hari sepulang sekolah anak berusia 12 tahun itu bergegas menuju ke tangki air untuk menampung air ke dalam botol-botol plastik sebelum kembali ke rumah dan menuangkan air yang dikumpulkannya ke dalam bak penampungan air di rumahnya.

Desa Mangu letaknya dekat dari laut, namun banyak sumber air di sekitar desa yang airnya tidak bisa diminum, sebelum akhirnya ada tangki air, masyarakat terpaksa harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih.

Ibu Ningsih, Lasmita, adalah salah seorang warga yang tidak memiliki pilihan lain kecuali harus berlelah-lelah menempu perjalanan jauh demi mendapatkan air bersih, walaupun di saat sedang hamil.

“Saya harus pergi ke mata air sebanyak dua kali setiap pagi untuk mencuci dan membawa enam hingga delapan botol air,” kenangibu berusia 42 tahun dengan wajah sedih.

Sulitnya akses terhadap air bersih diperparah dengan kurangnya kebersihan desa. Masih banyak warga yang sering buang air besar di hutan. Hal ini kerap menyebabkan diare. Kekurangan gizi juga menghantui warga warga di sana.

Karena WVI adalah sebuah organisasi Kristiani dan mayoritas penduduk Desa Mangu beragama Islam, banyak warga yang awalnya merasa curiga atas niat baik lembaga ini. Lasmita dan keluarganya memiliki pandangan yang berbeda: mereka percaya WVI dapat menolong warga desa.

Kemarahan atas dukungan Lasmita terhadap WVI memuncak saat beberapa warga yang berpandangan ekstrim mengancam akan membakar rumah mereka. Namun akhirnya kemarahan dan ketidakpercayaan itu luntur juga dan warga kemudian mulai menyambut WVI dan bahkan berpartisipasi dalam program mereka.

Partisipasi dari warga setempat adalah hal yang mendasar dalam membangun tangki air bersih tersebut. Sehubungan dengan itu WVI menyelenggarakan beberapa pertemuan dengan warga untuk membahas permasalahan mendapatkan air bersih dan memilih bersama tempat di mana tangki akan diletakkan, yang mana akhirnya diputuskan setelah seorang ahli geologi diundang untuk memberi masukan.

Program ini membutuhkan waktu dan upaya, namun telah menolong warga Desa Mangu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan akses yang kini lebih mudah dan nyaman untuk mendapatkan air bersih, kini warga Desa Mangu dapat mandi, menyikat gigi dan hidup lebih sehat.

Tak lama lagi Ningsih akan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama dan ia bercita-cita menjadi seorang guru matematika. Dengan lingkungan yang lebih sehat tempat dimana ia hidup, Ningsih percaya cita-citanya dapat tercapai.

cooperation with the Palu authorities.

Ningsih smiles shyly as she describes the simple joy of bathing at home. Every day after school, the 12-year-old hurries to the newly installed tank to fill her collection of plastic bottles before making the short journey home to deposit the clean water in her family's storage facility.

Mangu is close to the sea, but much of the spring water around the village is undrinkable, which, until the tank was built, forced the locals on the daily slog to find purer water.

Ningsih's mother, Lasmita, was one of many who had no choice but to make the exhausting trip before daybreak, even when pregnant.

“I had to go to the spring twice every morning to wash our clothes and bring back six to eight bottles of water,” remembers the 42-year-old without fondness.

The difficult access to clean water exacerbated the village's lack of hygiene with defecation in woodland areas leading to diarrhoea. Malnutrition also blighted the local population.

Given WVI is a Christian organisation and the majority of Mangu residents are Muslims, many were suspicious of the group's intentions. Lasmita and her family had a different view: they believed WVI would help the villagers.

Fury towards Lasmita for supporting WVI spilled over when extreme elements among her neighbours threatened to burn down her home before abandoning their plan. As anger and mistrust faded, however, more locals began to welcome WVI and even participate in their programmes.

Local participation was essential to build the tank, so WVI hosted meetings for residents to discuss their problems in accessing clean water and select where the tank would be placed, which was finally decided after inviting a geological expert to offer advice.

The project took time and effort, but it has helped Mangu's population have better lives. With convenient access to clean water, they can bathe, brush their teeth and generally live more healthily.

Ningsih will go to middle school soon and she dreams of being a mathematics teacher. With a healthier environment in which to live, she believes her dream will come true.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Field Communication WVI Indonesia. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kegiatan WVI Indonesia, Anda dapat mengunjungi www.wvindonesia.org

Sharing Pengalaman **FORUM BELAJAR LEMBAGA LAYANAN KAWASAN TIMUR**

Oleh **Sarni Mawarni**

Forum belajar merupakan sebuah perkumpulan dari beberapa lembaga pemberi layanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini terselenggara melalui mitra MAMPU yang bekerjasama dengan Komnas Perempuan. Forum belajar ini dibentuk untuk membangun mekanisme layanan antar lembaga pemberi layanan, dan lebih khusus pada lembaga dalam satu kawasan. Hingga saat ini, forum belajar ini telah beranggotakan 37 lembaga se-Indonesia. Forum ini mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mengimplementasikan layanan berbasis komunitas.

Pertemuan konsolidasi forum belajar kawasan timur adalah suatu langkah dalam memetakan kekuatan dan hambatan serta perkembangan penanganan korban yang menjadi tanggung jawab bersama. Pada kesempatan kali ini, peserta forum melakukan review pemberlakuan 10 tahun UU PKDRT. Selain itu, forum belajar Program MAMPU ini mendorong adanya rancangan UU Kekerasan Seksual, sebagai salah satu upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di tengah minimnya

Foto **Sarni Mawarni**



Pertemuan konsolidasi forum belajar kawasan timur adalah suatu langkah dalam memetakan kekuatan dan hambatan serta perkembangan penanganan korban yang menjadi tanggung jawab bersama.

perangkat hukum nasional. Dalam memaksimalkan peran dan fungsi forum belajar kawasan timur, peserta diajak untuk mencoba memetakan rencana strategi kegiatan kawasan timur sekaligus mendorong keberlanjutan kinerja jejaring.

Forum belajar ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai media untuk berbagi pengalaman terkait dengan hambatan dan kekuatan, serta terobosan dalam upaya penanganan kasus. Forum ini juga membangun konsolidasi gerakan melalui forum belajar kawasan timur, serta mengajak peserta forum membuat rencana kerja forum belajar yang sesuai dengan arah gerakan mitra Komisi Nasional Perempuan.

Forum belajar ini diselenggarakan di Ambon, pada tanggal 3 – 7 September 2014. Forum ini diikuti oleh 61 peserta dari beragam 24 organisasi, termasuk juga Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara.

Kegiatan konsolidasi forum belajar ini dilaksanakan selama tiga hari. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pertemuan tatap muka dengan melibatkan peran aktif dari semua peserta. Pasalnya peserta forum belajar ini merupakan sumber informasi yang diharapkan dapat membagi pengalaman dari lembaga/organisasinya. Dalam proses belajarnya, semua peserta melakukan diskusi terbuka dalam kelompok, dan melakukan tanya jawab, serta mempresentasikan hasil diskusi. Hasil diskusi yang dilakukan ini lebih kepada memberikan beberapa usulan dalam mendorong pembentukan UU kekerasan seksual.

Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu peserta dalam forum belajar kawasan timur ini, dapat menjadi mitra kerja bersama Komnas Perempuan. Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara telah mendapat manfaat langsung, yaitu dilibatkan dalam setiap sesi kegiatan Komnas Perempuan dan forum belajar kawasan timur.

Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara mendapat pengalaman dan informasi baru tentang keberadaan forum belajar sebagai wadah kebersamaan dalam meningkatkan kualitas dan mekanisme pelayanan, penanganan serta pemulihan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis komunitas. Lebih dari itu, melalui kegiatan ini juga dapat membangun rasa persaudaraan dan kesepahaman bersama tentang koordinasi dan komunikasi diantara anggota forum belajar kawasan timur dan sesama anggota lembaga kawasan se-Indonesia.

“Sebagai anggota dan peserta baru, kegiatan ini menjadi permulaan dalam memahami forum belajar lembaga layanan. Hal ini membuat saya belajar dalam membangun komunikasi secara aktif dalam setiap sesinya,” ujar Sarni, peserta forum belajar dari Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara.

Forum ini memberikan pengetahuan dan informasi baru tentang mekanisme pelayanan berbasis komunitas. Hal ini diupayakan agar peserta semakin mengetahui adanya forum belajar yang terdiri dari beberapa lembaga layanan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Forum belajar ini mengajak peserta untuk dapat memahami tentang mekanisme pengaduan lembaga layanan dalam melakukan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peserta difasilitasi dalam memberikan usulan dan tanggapan terkait evaluasi dan refleksi 10 tahun UU PKDRT No 23 Tahun 2004, serta memfasilitasi peserta dalam memberikan usulan untuk mendorong lahirnya UU Kekerasan Seksual.

Sarni menambahkan bahwa melalui forum ini, ia mendapat pengetahuan baru tentang proses pemulihan transformatif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebagai rencana kerja tindak lanjut dalam kegiatan ini, Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara akan mendorong implementasi pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis pada komunitas. Lebih dari itu, adalah dengan melakukan diskusi tematik terhadap lembaga layanan di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendorong pelayanan berbasis komunitas dan menyusun rencana strategi memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan yang terakhir adalah dengan menyusun SOP kelembagaan untuk lembaga pelayanan dan mekanisme pengaduan yang berbasis pada komunitas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator bidang perempuan dan ekonomi di Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara. Dapat dihubungi melalui email di sarni.2003@gmail.com

Program Mitra Pembangunan Internasional

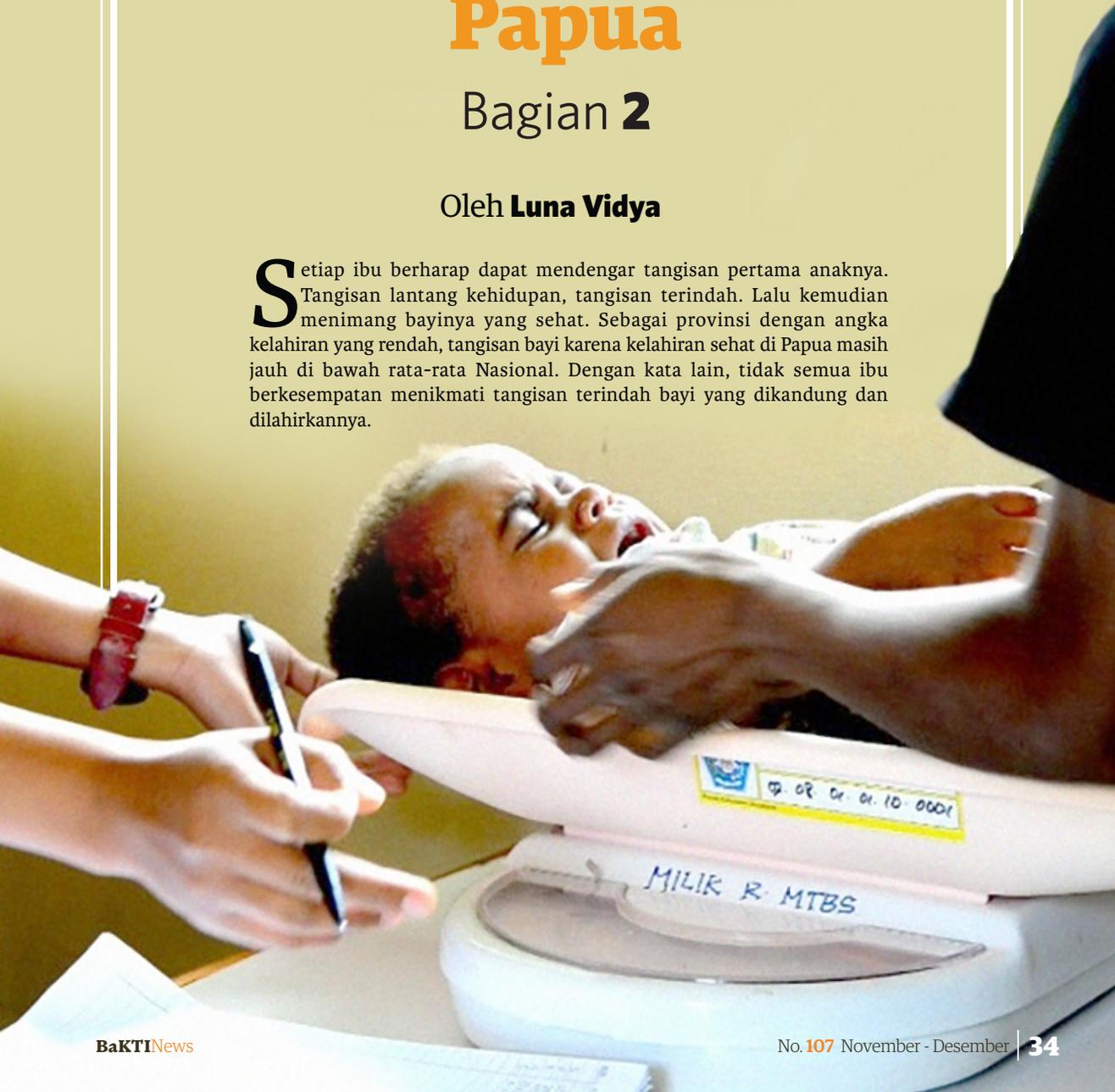
ABC KINERJA-USAID Papua

Strategi Memperkuat Sistem Kesehatan Papua

Bagian 2

Oleh **Luna Vidya**

Setiap ibu berharap dapat mendengar tangisan pertama anaknya. Tangisan lantang kehidupan, tangisan terindah. Lalu kemudian memimang bayinya yang sehat. Sebagai provinsi dengan angka kelahiran yang rendah, tangisan bayi karena kelahiran sehat di Papua masih jauh di bawah rata-rata Nasional. Dengan kata lain, tidak semua ibu berkesempatan menikmati tangisan terindah bayi yang dikandung dan dilahirkannya.



Perlu banyak usaha untuk membuat adegan seorang ibu tersenyum sambil memeluk bayi yang menangis lantang, karena lahir sehat menjadi kenyataan bagi lebih banyak ibu di Papua. Perlu fasilitas dan peralatan medis yang memadai untuk membantu tenaga kesehatan yang terlatih. Perlu para tenaga kesehatan yang terlatih di Puskesmas. Perlu Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan sesudah kelahiran. Bahkan orangtua sang bayi sendiri perlu merencanakan kelahiran yang sehat, mulai dengan memeriksakan kehamilan minimal 4 kali, mendapatkan suntik tetanus, minum tablet zat besi, periksa darah, makan makanan bergizi dan tidur di bawah kelambu. Perlu jadwal rutin dan kepastian vaksin di antar ke Puskesmas.

Tapi bukan hanya Puskesmas atau fasilitas dan peralatan medis yang memadai. Bukan hanya tablet zat besi. Bukan hanya makanan bergizi atau kelambu serta suntik tetanus. Perlu partisipasi dari banyak pihak untuk memastikan Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi. Perlu Dinas Kesehatan untuk memastikan Puskesmas memiliki staf dan manajemen yang berkualitas, termasuk pengelolaan data kesehatan dari tingkat masyarakat sampai tingkat dinas. Perlu upaya memastikan persediaan medis berpindah dari dinas terkait menuju Puskesmas. Perlu upaya mendirikan Puskesmas dan Posyandu yang aktif memberikan pelayanan kesehatan.

Partisipasi juga perlu datang dari masyarakat, karena masyarakat berhak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah perlu melibatkan masukan masyarakat dalam perencanaan dan

pembiayaan kesehatan. Perlu media serta peran pemimpin adat, agama dan tokoh perempuan untuk memastikan semua orang paham hak-hak mereka atas layanan kesehatan. Pemerintah sudah berusaha menyediakan pemberi layanan kesehatan yang terlatih, sehingga ibu mengandung menjadi ibu yang bahagia karena melahirkan dengan sehat dan selamat.

Inilah yang disebut dengan sistem kesehatan. Di dalamnya ada komitmen terhadap anggaran, namun sejajar dengan besarnya anggaran. Sistem kesehatan yang berjalan baik, memerlukan dukungan, seperti penguatan kapasitas, akses kepada konsultasi teknis bagi tenaga kesehatan di pedalaman, atmosfer dialog yang inspiratif antara para pendukung kepentingan pembangunan kesehatan, di tingkat unit layanan (Puskesmas) dengan kabupaten.

Dialog yang bersifat mutualis antar pendukung kepentingan. Bukan sekedar koordinasi antar ordinar dan subordinat. Dialog akan melahirkan kolaborasi yang pada akhirnya akan memperbesar nilai percepatan sistem kesehatan ini. Selain dialog pada tingkat unit layanan, kabupaten dan provinsi, implementasi SPM juga menjadi perhatian KINERJA-USAID di Papua.

Perlu Dinas Kesehatan untuk memastikan Puskesmas memiliki staf dan manajemen yang berkualitas, termasuk pengelolaan data kesehatan dari tingkat masyarakat sampai tingkat dinas.





SPM juga menjadi acuan DPRD ketika membuat dan menentukan kebijakan anggaran, juga bagi stakeholder lainnya seperti Program Kinerja-USAID Papua ketika berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan.

Aplikasi SPM di Papua

Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang kesehatan adalah acuan bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan no.36/2009. SPM juga menjadi acuan DPRD ketika membuat dan menentukan kebijakan anggaran, juga bagi stakeholder lainnya seperti Program Kinerja-USAID Papua ketika berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan. SPM selanjutnya juga menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengawasi pembangunan kesehatan.

Sebelumnya program Dinas Kesehatan maupun Puskesmas cenderung salah sasaran, dan tidak memberi dampak pada upaya memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Hal ini berdasarkan jumlah anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan sering hanya merujuk pada program-program yang ada pada periode sebelumnya. Ketika ini menjadi praktik penyusunan Program Kerja di Puskesmas, Puskesmas terperangkap dalam memprioritaskan fungsi pengembangan atau inovasi daripada pemenuhan kesehatan wajib kepada masyarakat.

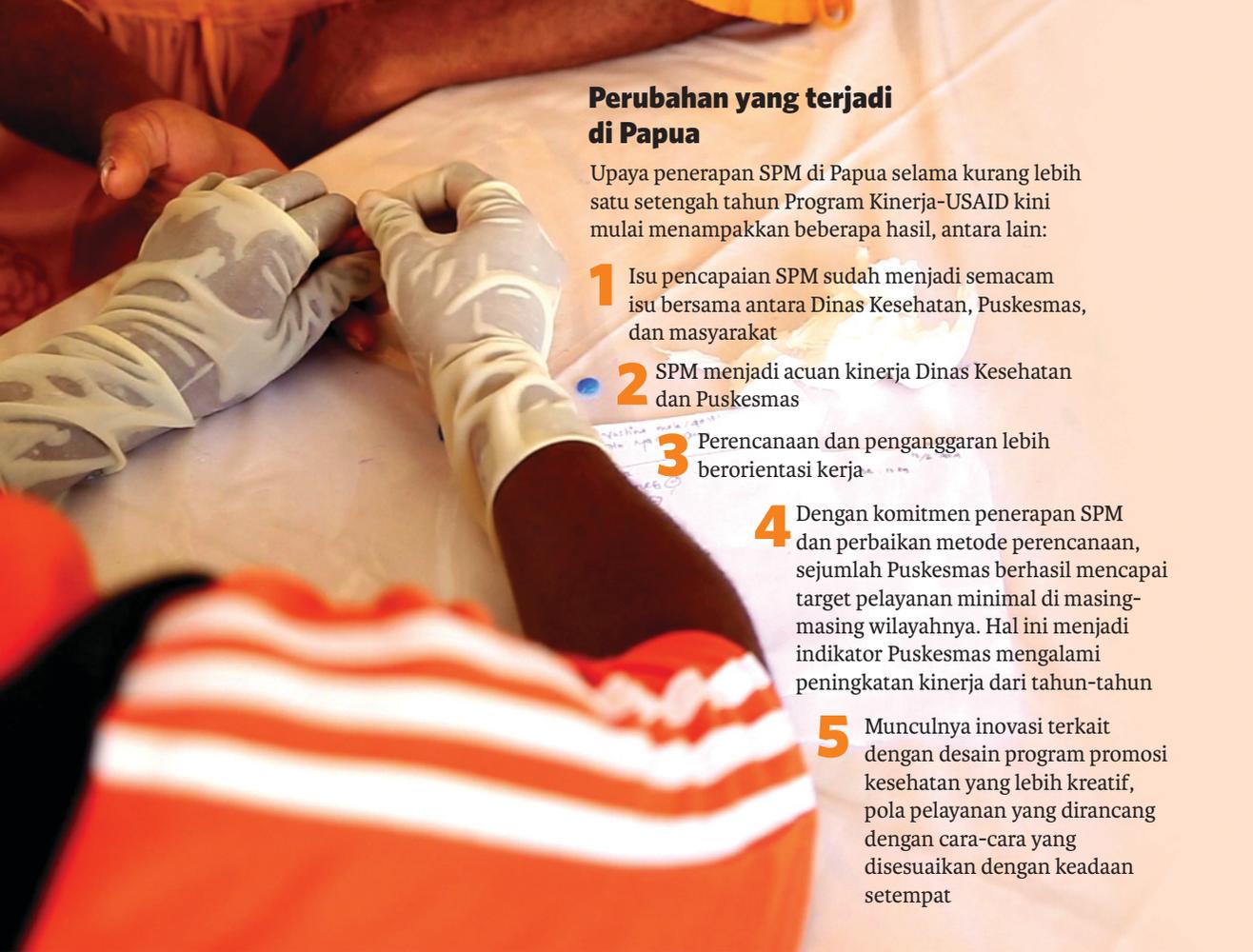
Dengan adanya SPM, proses perencanaan dan penganggaran kegiatan Dinas Kesehatan dapat menjadi lebih baik. Rencana usulan kegiatan Puskesmas dibuat berdasarkan target Dinas Kabupaten/Kota, bukan lagi asal meniru program-program periode sebelumnya. Dengan adanya SPM, program di Puskesmas disusun berdasarkan tujuan yang berkontribusi pada pemenuhan target SPM di

tingkat kabupaten/kota. Target antar Puskesmas belum tentu sama. Target disesuaikan dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, sarana dan prasarana, serta populasi.

Selain itu, SPM juga mengedepankan kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan dinas terkait lain, misalnya Dinas PU untuk infrastruktur dasar yang menunjang layanan kesehatan. Selain bekerja sama dengan dinas terkait lain, SPM juga mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam wilayah kerja masing-masing Puskesmas untuk memenuhi capaian target tersebut.

Pada proses penerapan SPM, terdapat kendala yang berbeda di masing-masing daerah. Tiga dari kendala proses aplikasi SPM meliputi:

1. Identifikasi kesenjangan terhadap target SPM
2. Identifikasi penyebab kesenjangan, sebagai dasar perumusan program alternatif
3. Menentukan program prioritas



Perubahan yang terjadi di Papua

Upaya penerapan SPM di Papua selama kurang lebih satu setengah tahun Program Kinerja-USAID kini mulai menampakkan beberapa hasil, antara lain:

- 1** Isu pencapaian SPM sudah menjadi semacam isu bersama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan masyarakat
- 2** SPM menjadi acuan kinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas
- 3** Perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi kerja
- 4** Dengan komitmen penerapan SPM dan perbaikan metode perencanaan, sejumlah Puskesmas berhasil mencapai target pelayanan minimal di masing-masing wilayahnya. Hal ini menjadi indikator Puskesmas mengalami peningkatan kinerja dari tahun-tahun
- 5** Munculnya inovasi terkait dengan desain program promosi kesehatan yang lebih kreatif, pola pelayanan yang dirancang dengan cara-cara yang disesuaikan dengan keadaan setempat

Untuk mengatasi hal ini, dilakukan kegiatan Costing SPM. Kegiatan *Costing SPM* yang didukung KINERJA-USAID sederhananya adalah proses penghitungan biaya yang dibutuhkan supaya Puskesmas dapat berkontribusi terhadap target Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Proses *costing SPM* dilakukan melalui sejumlah lokakarya dan FGD yang dihadiri oleh Bappeda, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan kelompok-kelompok masyarakat peduli kesehatan (forum *multi stakeholder*). Melalui proses *costing SPM*, yaitu proses identifikasi kesenjangan, penyebab kesenjangan, program prioritas, perkiraan biaya yang diperlukan, dan indikasi sumber pembiayaan, para pendukung kepentingan menyepakati program prioritas dan biaya yang akan dialokasikan untuk menerapkan SPM Kesehatan tersebut. Hasil *costing SPM* kemudian melalui proses konsultasi publik untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan dan pemantauan.

Tahap berikutnya adalah integrasi hasil *costing*. Program prioritas yang dirancang untuk didanai lewat APBD kabupaten/kota diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan. Sedangkan program prioritas

yang dirancang untuk didanai sumber lain, diusulkan kepada pihak yang berwenang atas sumber pendanaan terkait.

Dengan komitmen tinggi dan kolaborasi antar pihak, penerapan Standar Pelayanan Minimal di Papua seharusnya menjadikan program-program yang direncanakan berorientasi hasil, lebih kreatif, inovatif, tepat sasaran, dan mendapat dukungan dari masyarakat. Sehingga pemenuhan hak kesehatan bisa dilakukan lebih terarah dan maksimal.

Tidak mudah untuk membuat seorang bayi menangis. Melalui sistem kesehatan yang berfungsi dan kuat, hal ini mampu mendukung dan menjamin masa depan bayi untuk dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas, serta mampu bertumbuh dan menjadikan tanah Papua menjadi tempat kehidupan yang lebih baik.

Foto-foto : **Dok. KINERJA-USAID**

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut mengenai program KINERJA-USAID Papua, anda dapat menghubungi Sdri. Luna Vidya melalui email lunavidya@bakti.or.id

Praktik Cerdas

PPID KLU, DINKES,
PUSKESMAS KAYANGAN

Upayakan Pelayanan Berkualitas

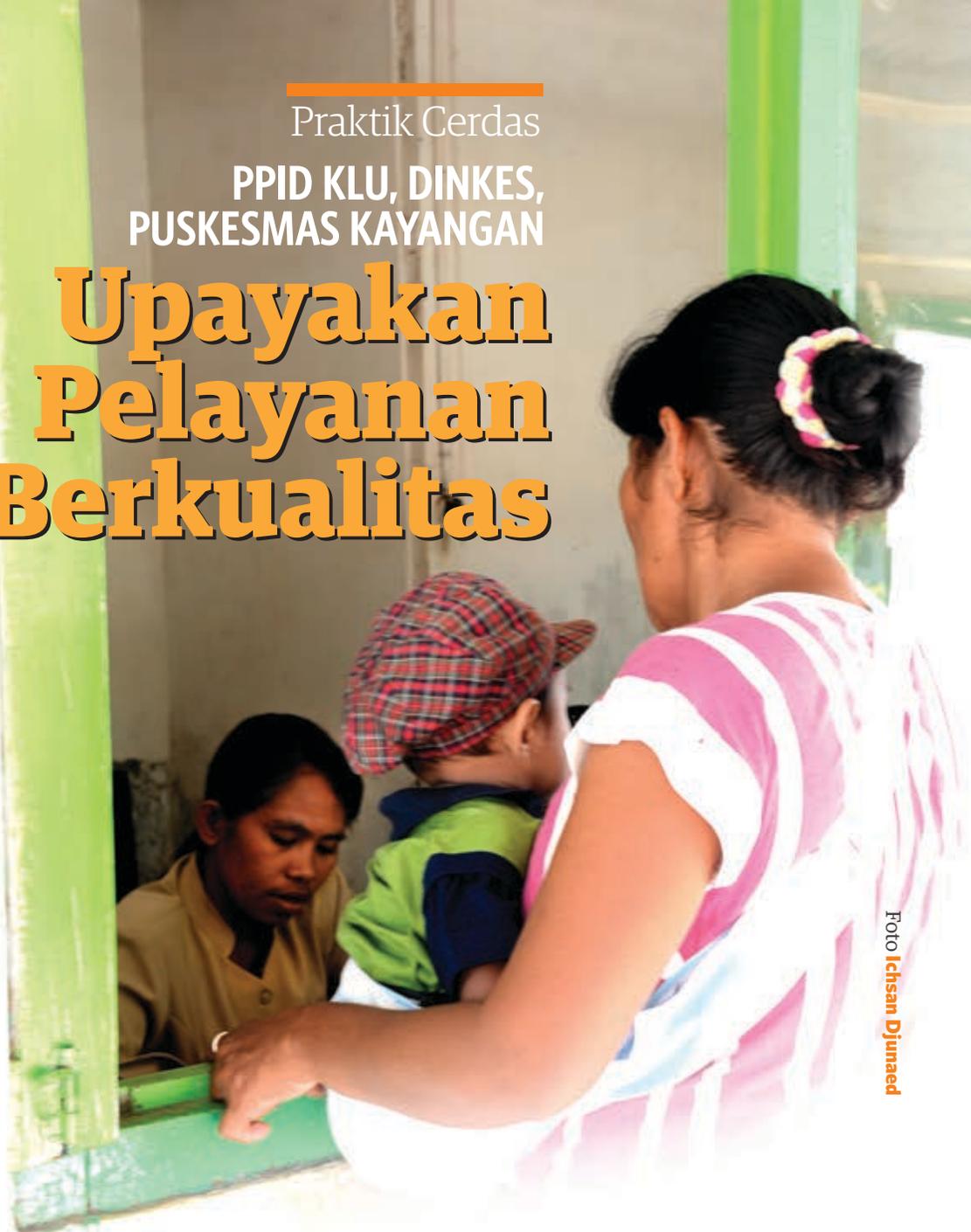


Foto Ihsan Djunaed

Klaim empiris pemberdayaan sementara diuji. Media lokal di Lombok Utara menyebut ada dua kasus kematian balita karena gizi buruk di tahun 2009. Kemudian, pada pertengahan 2010, ada delapan kasus terindikasi gizi buruk di kecamatan Bayan, Kayangan, dan Pemenang.

Berdasarkan pengalaman dari berbagai lokasi, isu kesehatan yang terabaikan di tataran masyarakat sering melampaui data yang sempat tercatat dan diberitakan. Penyelenggara negara dalam melaksanakan tanggung jawab kesejahteraan masyarakat dalam setiap publikasinya senantiasa memberikan informasi yang positif, namun ketika kondisi tersebut diusut ke dalam tataran implementasi ternyata tidak sesuai dengan hasil publikasi tersebut.

Masyarakat memiliki hak dalam pemenuhan kebutuhan atas informasi terkait layanan publik yang mereka terima. Hal ini juga berkaitan dengan peran pemerintah sebagai pelaksana di daerah. Sehingga dilakukan uji coba dalam thesis penyelenggaraan Negara.

“Siapa saja boleh mengakses informasi. Kami menyiapkan brosur, leaflet, standing banner, dan juga pemutaran film.

Ke depan kami berencana membangun stasiun radio untuk sosialisasi bentuk-bentuk layanan yang disediakan bagi masyarakat.”

Informasi pelayanan publik, mestinya bersifat terbuka, dan dapat diakses setiap pengguna. Hal ini diwujudkan dengan implementasi yang sementara berlangsung di Kabupaten Lombok Utara dengan harapan semua masyarakat dapat mengakses informasi pelayanan publik. Suhardi SKM, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lombok Utara, menyebutkan bahwa sejauh ini data dan informasi sudah disiapkan. “Siapa saja boleh mengakses informasi. Kami menyiapkan brosur, leaflet, standing banner, dan juga pemutaran film. Ke depan kami berencana membangun stasiun radio untuk sosialisasi bentuk-bentuk layanan yang disediakan bagi masyarakat.” Suhardi SKM, menghimbau kepada masyarakat yang meminta informasi agar mencantumkan alamat jelas untuk memudahkan pelayanan publik.

Informasi anggaran dapat diakses di Rakerda, Rakercam, dan Rakerdes. Sosialisasi juga dilakukan di setiap SKPD terkait. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan, semua informasi terbuka bagi siapa yang membutuhkan, terutama perihal sistem layanan dan sistem pengelolaan. Pada tingkat desa, rapat koordinasi diselenggarakan per tiga bulan. “Rakordes salah satu sarana bagi kami untuk sosialisasi program kesehatan,” kata Yartip Amd, Kepala Puskesmas Kayangan. “Nomor handphone saya ada pada masing-masing CC, supaya mereka gampang menghubungi.”

Kemajuan pelayanan kesehatan di Lombok Utara dikisahkan Yartip, utamanya di lima desa di mana ia mengabdikan sebagai Kepala Puskesmas. “Masing-masing desa sudah ada dua bidan dan satu perawat lulusan D3 keperawatan yang membantu dalam bidang kesehatan. Kami menjaring ibu hamil sedini mungkin dengan bantuan para kader. Dukun kampung bekerjasama dengan Puskesmas, dan kami membantu transportasinya. Ada obat gratis di Posyandu serta pengobatan massal yang dilaksanakan sebulan sekali.”

Hal ini menjadi sebuah harapan yang terus ditabur. Setiap kejadian luar biasa dan wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat. Sehingga tidak menimbulkan dampak yang meluas. Semua persediaan farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan memenuhi syarat. Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan. Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh Puskesmas. “Program PNPM-GSC sudah meringankan Pemerintah Daerah dalam menekan angka kurang gizi dan gizi buruk. Sektor layanan dasar masyarakat ditetapkan berdasarkan data yang kami temukan di lapangan. Tahun 2012 ada sekitar lima ratus anak terindikasi kurang gizi yang telah ditangani. Upaya ini terus kami tingkatkan hingga saat ini. Upaya ini dilakukan agar angka anak kurang gizi dan gizi buruk dapat ditekan. Pihak kami selalu mengupayakan pelayanan yang berkualitas,” ujar dr. H. Benny Nugroho S, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.

Beberapa hal yang telah disebutkan oleh dr. H. Benny Nugroho S, menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat di Lombok Utara. “Di sini kita dihadapkan dengan kualitas sumber daya manusia yang minim, sehingga kami merencanakan sumber dana untuk mencerdaskan anak-anak. Kita dihadapkan dengan pola perilaku hidup masyarakat yang belum *aware* dengan cara hidup sehat yang ditambah dengan kondisi geografis. Tantangan tradisi ‘*merariq*’ pada suku Sasak menjadi concern kami agar menjadi prioritas dalam peraturan daerah di tahun 2014 untuk menekan tingginya angka perkawinan dini.”

Pemerintah, melalui Dinas Kesehatan, menginginkan masyarakat sadar, mau dan mampu mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi. Langkah-langkah pemulihan sementara sedang dikerjakan. “Kami berharap setiap kejadian dapat dilaporkan secara cepat kepada Kepala Desa untuk kemudian diteruskan ke instansi terdekat,” ujar dr. H. Benny Nugroho S. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan di semua sektor, pelayanan berkualitas terus diupayakan, dan dilakukan pembenahan pada semua bentuk pelayanan publik.

- ▶ Tradisi kawin lari atau *merariq*, yang berarti melarikan calon istri ke rumah kerabat atau keluarga pihak laki-laki, kemudian nantinya keluarga atau kerabat tersebut menyampaikan pesan kepada keluarga pihak perempuan bahwa anaknya telah dilarikan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, Anda dapat menghubungi Stevent Febriandy, Program Manager KM AIPD, melalui email sfebriandy@bakti.or.id



Kegiatan di BaKTI

15 November 2014

NEWS Café "Tantangan dan Peluang Mengoptimalkan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan Masyarakat"



Yayasan BaKTI Makassar bekerjasama dengan Program JICA-PRIMA Kesehatan menggelar diskusi NEWS Café dengan mengangkat topik "Tantangan dan Peluang Mengoptimalkan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan Masyarakat". Diskusi ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem dan mekanisme yang dikembangkan melalui program kerjasama Pemerintah Sulawesi Selatan dan Pemerintah Jepang, yang dianggap relevan dengan tantangan saat ini.

Diskusi ini membuka ruang dialog antara stakeholder pemerintah dan media massa tentang peluang dan tantangan memanfaatkan pembelajaran dari proyek tersebut bagi wilayah lain. Diskusi ini dihadiri oleh 27 peserta yang berasal dari media, pemerintah daerah, LSM/CSO.



BaKTI bekerjasama dengan POLSEK Tallo menyelenggarakan Inspirasi BaKTI dengan mengangkat tema "Ruang Konsultasi Solusi – Program Inovasi Polsek Tallo, Makassar". Hadir Kompol Woro Susilo (Kapolsek Tallo, Makassar) sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Beliau berbagi inspirasi tentang bagaimana Polsek Tallo menyediakan sebuah ruang konsultasi bagi masyarakat Tallo untuk dapat berkonsultasi dengan nyaman. Melalui inovasi ini, Polsek Tallo dapat menurunkan tingginya tingkat main hakim sendiri yang sering terjadi di wilayah Tallo. "Media ruang konsultasi ini juga menjadi wadah sosialisasi bagi masyarakat agar dapat memahami proses hukum", ujar bapak Woro Susilo.

Event ini dihadiri oleh 32 peserta yang berasal dari kepolisian, pemerintah daerah, media, LSM/CSO, dan program donor.

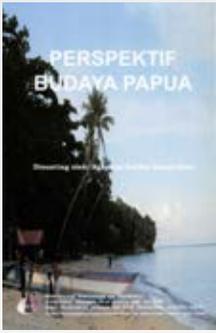
21 November 2014

Inspirasi BaKTI Ruang Konsultan Solusi (RKS)

10 November 2014 Pertemuan Inisiasi Penyusunan RAD Isu Disabilitas di Sulawesi Selatan

Yayasan BaKTI bersama Organisasi Pemerhati (ICJ) dan beberapa organisasi Disabilitas (HWDI, YTLI, PERMATA) Sulawesi Selatan menyelenggarakan diskusi awal membahas rancangan Rencana Aksi Daerah dalam rangka mendorong percepatan implementasi regulasi yang ada, seperti Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas di Kota Makassar. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi Rencana Aksi Daerah untuk Isu Disabilitas di Sulawesi Selatan.

Diskusi inisiasi ini dihadiri oleh 7 orang (Husaema Husain (Ema) dari AIPJ Sulsel, Ruri S. dari AIPJ Sulsel, Maria Un dari HWDI, Al Qadri dari Permata Sulsel, Dody Tumanduk dari YTLI Sulsel, Arafah dan Nirwana dari BaKTI. Salah satu Rencana Aksi Daerah yang dapat diidentifikasi adalah Pembentukan Rumah Pengaduan oleh LBH Makassar.



Perspektif Budaya Papua

PENULIS Agapitus Ezebio Dumatubun ISBN 978-602-98929-6-3

Perspektif Budaya Papua berisi himpunan berbagai karya tulis dari seminar Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Jayapura dari tahun 2011. Ada sebelas naskah yang menjadi sumber diantaranya Fungsi dan Makna Etai pada Ritus Mawek orang Hubula di Kabupaten Jayawijaya, Teknologo Tradisional Perdagangan Orang Klaisu. Tulisan ini mencoba mengemukakan gambaran umum kondisi alam dan sosial budaya orang Papua yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan di Papua.



Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisis Data Terpilah Untuk Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender

PENERBIT Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)
ISBN 978-602-8003-35-3

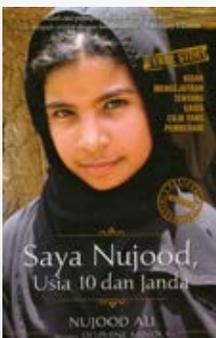
Ketersediaan data terpilah menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan analisis dalam menentukan program-program kerjanya, agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga laki-laki dan perempuan di wilayah itu. Berdasarkan kebutuhan ini buku Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisis Data Terpilah Untuk Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender ini disusun. Buku ini menitikberatkan pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu perhatian utama pembangunan Indonesia.



Suaraku Ekspresiku

PENULIS Nurul Ilmi Idrus ISBN 978-602-17880-0-4

Buku ini merupakan kumpulan tulisan prof. Nurul Ilmi Idrus yang secara reguler diterbitkan di salah satu koran terbesar di Indonesia Timur. Kumpulan tulisan ini merupakan ekspresi penulis tentang realitas yang "hidup" dan kehidupan yang terjadi di Indonesia dari beragam aspek. Tema tulisan beragam, mulai dari politik, korupsi, rumah tangga, perempuan, gender, seksualitas, kesehatan hingga berbagai filosofi kehidupan.



Saya Nujood, Usia 10 dan Janda

PENULIS Nujood Ali bersama Delphine Minou ISBN 978-979-3064-87-1

Kisah perjuangan seorang gadis cilik dalam memperjuangkan haknya sebagai anak, sebagai perempuan dan sebagai manusia ditengah kuatnya budaya adat istiadat Yaman tentang pernikahan belia. Kisah Nujood Ali ini bahkan menjadi pendorong perubahan di Yaman dan negara-negara Timur Tengah lainnya, tempat dimana hukum pernikahan dibawah umur terus diterapkan dan gadis-gadis belia yang menikah dibebaskan dengan perceraian.